BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat Pulau Sulawesi dengan luas wilayah 16.937,16 km^2 atau sekitar 9,76 persen dari luas Pulau Sulawesi. Sedangkan luas perairan laut mencapai 7.668,84 km^2 dengan panjang garis pantai barat dari utara ke selatan sepanjang 639,07 km^2. Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Adapun wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terbagi atas 6 kabupaten meliputi : (1) Kabupaten Mamuju dengan luas 4.999,69 Km^2, (2) Mamuju Utara dengan luas 3.043,75 Km^2, (3) Mamuju Tengah dengan luas 3.014,37 Km^2, (4) Kabupaten Majene dengan luas 947,84 Km^2, (5) Kabupaten Polewali Mandar dengan luas 1.775,65 Km^2. Dan (6) Kabupaten Mamasa dengan luas 3.005,88 Km^2. Tercatat ada 69 Kecamatan dan 638 Kelurahan/Desa. Persentase luas wilayah Kabupaten Se-Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik di bawah :

Grafik 01

Persentase luas wilayah Kabupaten Se-Sulawesi Barat

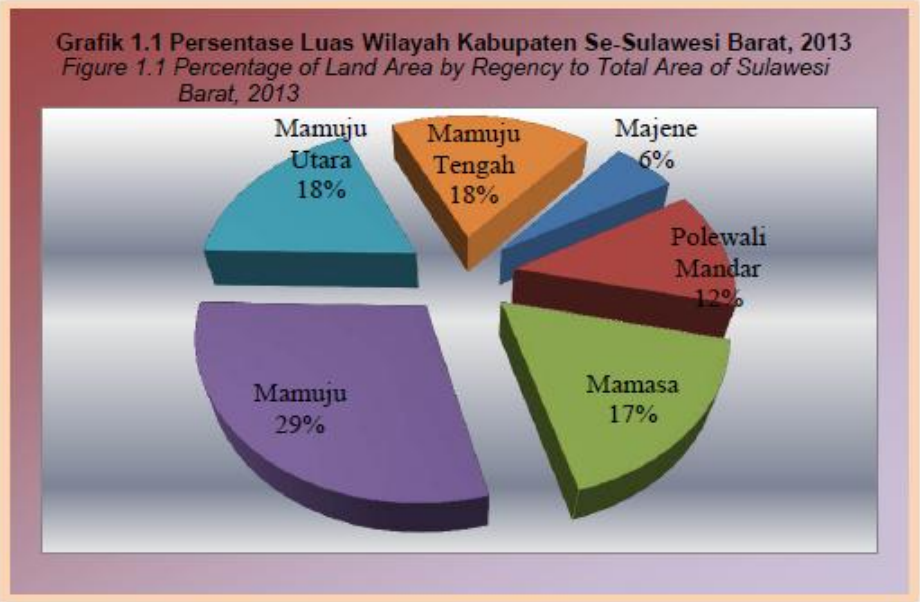

Sumber : Sulawesi Barat dalam angka 2015

1.1.2. Kependudukan

Sebagai daerah yang baru dengan sejumlah potensi yang dimilikinya, Sulawesi Barat memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah migran untuk memilih daerah ini sebagai tempat tinggal baru. Jumlah Penduduk Sulawesi Barat pada tahun 2015 mencapai 76 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang atau sebanyak 1.282,162 ribu jiwa, Adapun laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat tiap Kabupaten dapat diketahui seperti tabel berikut ini:

Tabel 01
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2010, 2014 dan 2015

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
Majene	151,11	161,13	163,90	1,61	1,72
Polewali Mandar	396,12	417,47	422,79	1,29	1,27
Mamasa	140,08	149,81	151,83	1,60	1,35
Mamuju	231,32	258,98	265,80	2,77	2,63
Mamuju Utara	134,37	152,51	156,46	3,04	2,60
MamujuTengah	105,65	118,19	121,38	2,77	2,70
Sulawesi Barat	1.158,65	1.258,09	1.282,16	2,01	1,91

Sumber : RKPD Perubahan 2016

Kepadatan penduduk di 6 Kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 209 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 40 jiwa/km2.

1.1.3. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2015 mencapai 7,37 %, pertumbuhan tersebut di topang oleh tumbuhnya beberapa sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,02 %, industri pengolahan sebesar 10,95 % serta informasi dan komunikasi sebesar 10,87 %. Pertumbuhan PDRB yang di hitung dengan menggunakan tahun dasar 2010 PDRB ADHB Provinsi Sulawesi

Barat mencapai 33,02 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 25,98 triliun rupiah. Pencapaian PDRB ADHB ini di dominasi oleh sektor pertanian yang berkisar 42,07 %, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan yang keduanya berkontribusi sama yaitu sebesar 10,31 %.

1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Perikanan

Sulawesi Barat memiliki garis pantai pada sisi barat Pulau Sulawesi yang berhadapan dengan Selat Makassar kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Pengembangan perikanan di Sulawesi Barat terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 mencapai 89.729,96 ton. Berikut tabel produksi perikanan budidaya menurut Kabupaten dan jenis budidaya Provinsi Sulawesi Barat :

Tabel 02

Produksi Perikanan Budidaya

Menurut Kabupaten dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Jenis Budidaya (Ton)					
		Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah
1	Majene	-	376,06	61,77	-	-	-
2	Polman	12.360,00	12.559,00	508,00	-	-	10,00
3	Mamasa	-	-	411,42	-	-	1.568,81
4	Mamuju	35.064,00	2.188,19	15,40	-	-	-
5	Mamuju Utara	-	4.953,90	827,05	-	-	-
6	Mamuju Tengah	6.316,00	12.452,36	58,00	-	-	-
	Sulbar	**53.740,00**	**32.529,51**	**1.881,64**	-	-	**1.578,81**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

2. Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya merupakan daerah agraris yang sebagian besar kehidupan masyarakat bertumpu pada usaha di Bidang Pertanian. Potensi pertanian yang besar dan kesesuaian agroklimat yang mendukung serta kultur masyarakatnya yang agraris, merupakan modal dasar untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian.

Bebarapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat. Produksi padi khususnya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi padi mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 2,72 % dari 449.621 ton menjadi 461.844 ton. Berikut grafik Produksi (ton) dan Produktivitas Padi (Ton/Hektar) di Sulawesi Barat :

Grafik 02 Produksi (ton) dan Produktivitas Padi (Ton/Hektar) di Sulawesi Barat

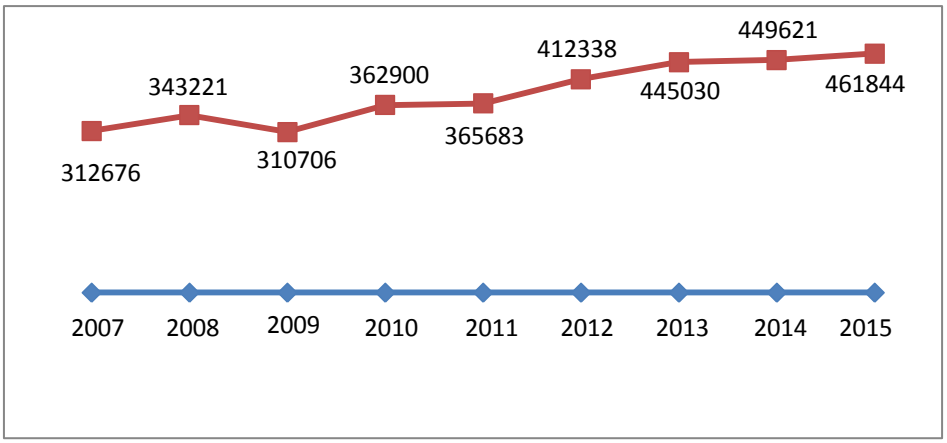

Sumber : PPS Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2016

3. Peternakan

Komoditas peternakan di Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 86.953 ekor, populasi kambing sekitar 225.766 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.696.726 ekor.

4. Perkebunan

Salah satu sub sektor yang terus berkembang di Provinsi Sulawesi Barat adalah perkebunan khususnya kelapa sawit dan kakao, tanaman perkebunan lain yang juga banyak di jumpai di Sulawesi Barat adalah kelapa dalam dan kelapa hibrida. Berikut grafik Perkembangan Produksi Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2013.

Grafik 03

Produksi Perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2013

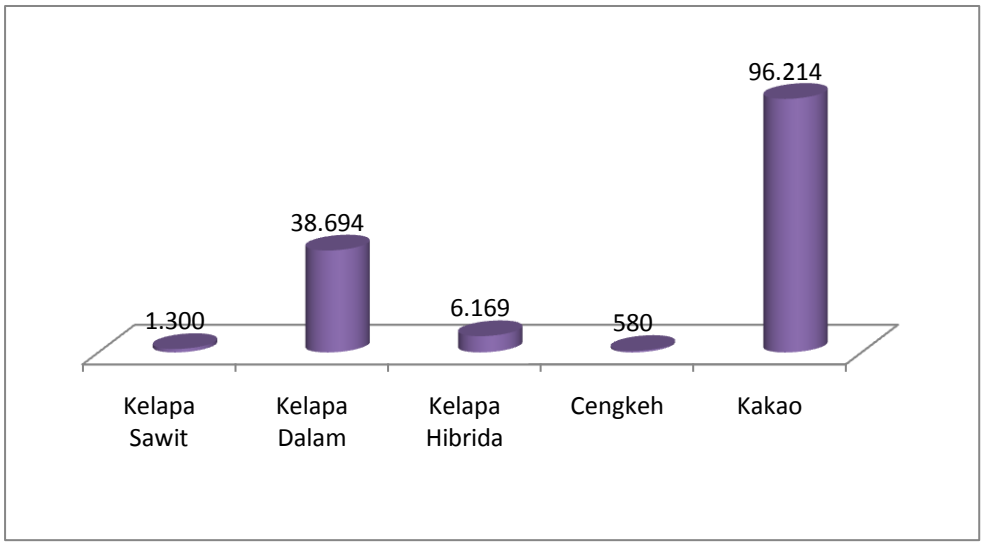

Sumber : BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2014

5. Kehutanan

Potensi hutan di Sulawesi Barat seluas kurang lebih 1.105.817 Ha yang terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 452.387 Ha, hutan produksi terbatas (HPT) 336.061 Ha, hutan produksi 77.345 Ha, hutan suaka marga satwa (HSAW) 214.184 Ha dan hutan produksi yang dapat di konversi 25.840 Ha dengan potensi hasil hutan umumnya meliputi : Kayu Eboni, Meranti, Getah Pinus, Jati, Palapi, Durian, Damar, Rotan, Kemiri, dan Kayu Campuran lainnya. Hasil produksi dari sektor kehutanan selama ini telah memberikan kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

6. Pariwisata

Di bidang pariwisata, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pariwisata yang relatif lengkap, mulai dari wisata bahari dengan keunikan kehidupan Suku Mandar sebagai pelaut ulung dengan perahu Sandeq (baca:

sandeq) yang sudah dikenal tidak hanya skala nasional akan tetapi perahu Sandeq juga telah beberapa kali dipamerkan di mancanegara bahkan sampai ke Negara-Negara Eropa.

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

7. Pertambangan

Potensi sumberdaya alam dari pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat cukup banyak. Di lepas pantai terdapat 8 (delapan) blok Minyak dan Gas Bumi, yang kesemuanya dalam tahap eksplorasi, dan 1 (satu) blok di daratan (*offshore*). Untuk jenis bahan galian logam terdapat emas, biji besi, mangan, nikel dan beberapa bahan galian logam lainnya. Bahan galian non logam akan dapat ditemukan granit, batu gamping, kaolin, dan pasir kuarsa.

Di Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa titik eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara lain di daerah Kecamatan Anreapi terdapat Galene dan Bijih Besi dengan jumlah potensi kandungan 20.756.000 metrik ton. Kemudian di daerah Tapango terdapat Galene dan Bijih Besi dengan

jumlah potensi kandungan 25.465.000 metrik ton, di daerah Campalagian terdapat kandungan Emas, Tembaga dan Perak dengan jumlah potensi kandungan 20.563.000 metrik ton, dimana ketiga jenis pertambangan ini telah memasuki tahap eksplorasi dan sebagian kecil telah akan di eksploitasi.

Untuk daerah kabupaten Mamasa, di daerah kecamatan Tabulahan terdapat kandungan mineral berupa Emas, Tembaga, Perak, Galena dengan potensi kandungan 30.756.000 metrik ton. Selanjutnya, di kecamatan Messawa terdapat kandungan mineral Tembaga, perak, Galena dengan potensi kandungan 35.583.000 metrik ton, dan di kecamatan Sumarorong terdapat Bijih Besi dan Mangan dengan potensi kandungan 25.825.000 metrik ton. Seluruh potensi kandungan ini telah di eksplorasi.

Jika dilihat dari jumlah sebaran titik daerah yang memiliki kandungan mineral maka wilayah Kabupaten Mamuju juga memiliki potensi kandungan mineral yang besar. Di Kecamatan Karossa terdapat kandungan mineral berupa Emas, Tembaga, Perak, Galena, Bijih Besi, dan Mangan dengan potensi kandungan 35.678.000 metrik ton, di daerah kecamatan Tobadak terdapat kandungan Tembaga, Perak, Bijih Besi, dan Mangan dengan potensi kandungan mineral 30.567.000 metrik ton.

Wilayah Kecamatan Bonehau juga memiliki kandungan mineral berupa Perak, Bijih Besi dan Mangan dengan potensi kandungan 50.523.000 metrik ton. Kemudian di Kecamatan Kalumpang terdapat potensi kandungan mineral berupa Emas, Tembaga, Perak dan Seng dengan potensi kandungan mineral

54.764.000 metrik ton. Potensi kandungan mineral berupa Batu Bara juga terdapat di wilayah Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dengan potensi kandungan masing-masing sebanyak 20.733.366 metrik ton dan 5.593.642 metrik ton, dimana seluruh titik-titik tersebut tengah dalam proses eksploitasi dan sebagian masih di eksplorasi.

Untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara, terdapat 3 (tiga) titik daerah yang memiliki potensi kandungan mineral, antara lain Kecamatan Dapurang memiliki kandungan mineral berupa Emas, Tembaga dan Galena dengan potensi kandungan 35.876.476 metrik ton, di Kecamatan Duripoku terdapat kandungan mineral berupa Bijih Besi, Galena dan Mangan dengan potensi kandungan 30.948.543 metrik ton dan di daerah Tikke terdapat kandungan mineral berupa Emas Letakan dengan potensi kandungan 25.837.546 metrik ton. Untuk semua titik potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara ini masih dalam tahap eksplorasi. Berikut tabel blok minyak dan gas bumi di Provinsi sulawesi Barat :

Tabel 03

Blok Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Blok	Investor	Luas (Km^2)	Lokasi	Tahap Kegiatan
1	Suremana	Exxon Mobile	5.339,63	Mamuju Utara	Eksplorasi
2	Mandar	Exxon Mobile	4.196,25	Majene, Polman	Eksplorasi
3	Pasangkayu	Marathon	4.707,63	Mamuju Utara	Eksplorasi
4	Kuma	Conoco Philips	5.088,10	Mamuju Utara, Mamuju	Eksplorasi
5	Budong-budong	Tately N.V	5.494,51	Mamuju Utara, Mamuju	Eksplorasi
6	Karama	State Oil Pertamina	4.287,37	Mamuju Utara	Eksplorasi
7	Karana	Pearl Oil	5.389,68	Majene	Eksplorasi
8	Malunda	PTT E & P	5.000,00	Majene	Eksplorasi
9	Mandar Selatan	PTT E & P	3.800,00	Polman	Eksplorasi

Sumber : Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016

1.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Isu strategis Tahun 2016

Disadari bahwa pelaksanaan pembangunan masih menghadapi beberapa permasalahan, sebagaimana yang telah di identifikasi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016. Permasalahan pembangunan yang dihadapi

tersebut di bagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu menurut Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan berdasarkan Urusan Pemerintahan.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Millennium Development Goals (MDG's)

   Permasalahan MDG's dari sisi tingkat kematian anak sudah cukup baik, namun masih perlu perhatian khusus dan perlu ditingkatkan dengan kerja keras hingga capaian di Tahun 2015. Selanjutnya dari sisi Kesehatan Ibu masih perlu ditingkatkan dan dalam perhatian khusus. Begitu pula dengan memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya masih perlu perhatian khusus hingga tahun 2015. Untuk memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, sampai sejauh ini masih perlu pula perhatian khusus hingga tahun 2015.

2. SDM Aparatur

   Dari sisi SDM Aparatur sudah cukup baik, Hal ini diindikasikan dengan penyempurnaan penerimaan pegawai yang sesuai kebutuhan daerah, namun sisi lain masih perlu peningkatan SDM Aparatur guna mendukung optimalnya sumber-sumber daya dalam mendukung terselenggaranya otonomi daerah melalui Pendidikan dan pelatihan serta kursus.

3. SDM Masyarakat

   Dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun hingga mencapai 70,73 pada tahun 2012. Namun demikian, pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah rata-rata nasional sebesar 73,29 (2012).

4. Perlindungan ibu dan anak

   Dari sisi perlindungan ibu dan anak dapat dikatakan masih sangat kurang. Hal ini diindikasikan dengan masih terbatasnya lembaga perlindungan Ibu dan Anak.

5. Sarana dan prasarana PAUD

   Dari sisi Sarana dan Prasarana PAUD, dapat dikatakan masih sangat kurang. Hal ini diindikasikan dengan masih rendahnya akses dan pelayanan pengembangan anak usia dini.

6. Angka buta huruf

   Dari sisi Angka Buta Huruf dapat dikatakan masih sangat kurang. Hal ini diindikasikan dengan masih kurangnya pelaksanaan program penuntasan buta aksara.

7. Pembinaan kepemudaan dan olahraga

   Dari sisi Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, dapat dikatakan masih sangat minim. Hal ini diindikasikan dengan belum optimalnya sarana dan prasarana, pembinaan kelembagaan dan prestasi olahraga dan kepemudaan.

8. Komoditas unggulan daerah

Dari sisi Komoditas Unggulan Daerah, dapat dikatakan masih sangat kurang dan/atau belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah.

9. Jaringan transportasi

Dari sisi Jaringan Transportasi, dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diidentifikasi dengan cakupan layanan jaringan transportasi antar wilayah makin meningkat. Namun demikian, pencapaian jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Barat masih perlu ditingkatkan karena masih rendahnya beberapa cakupan layanan jaringan transportasi antar wilayah sebagai penunjang kemajuan perekonomian daerah.

10. Energi listrik

Dari sisi Energi Listrik, dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diidentifikasi dengan cakupan energi listrik dalam menunjang seluruh aktifitas baik untuk rumah tangga dan industri serta perkantoran sudah cukup, dimana pada tahun 2014 telah dilaksanakan ground breaking PLTA Karama.

11. Wilayah perbatasan dan pulau terpencil

Dari sisi Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil, dapat dikatakan masih sangat butuh perhatian khusus. Belum maksimalnya pembangunan di wilayah perbatasan, terpencil dan kepulauan secara baik dan berkeadilan menjadi perhatian khusus.

12. Good Governance

Dari sisi Good Governance, dapat dikatakan belum optimal. Hal ini di identifikasi dengan belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan prinsip Good Governance.

13. Sumber Daya Alam

Dari sisi Sumber Daya Alam, dapat dikatakan belum optimal. Hal ini di identifikasikan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

14. Mitigasi bencana

Dari sisi Mitigasi Bencana, dapat dikatakan belum optimal. Hal ini di identifikasi dengan belum mitigasi bencana pada daerah-daerah rawan bencana.

15. Air bersih dan sanitasi lingkungan

Dari sisi Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, dapat dikatakan masih rendah. Hal ini di identifikasi Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Misi

Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016 memuat visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu :

"Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat Pada Tahun 2016"

Pernyataan Visi tersebut mensyaratkan 2 (dua) hal pokok yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Makna dari kedua hal pokok dalam Visi tersebut adalah :

1) **Percepatan Pertumbuhan Ekonomi**, yang berarti Sikap dan kondisi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Barat yang memiliki komitmen dalam melaksanakan pembangunan yang lebih cepat dengan mendayagunakan segala sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga Sulawesi Barat dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkeadilan. Berkeadilan maksudnya adalah bukan hanya sekedar tumbuh lebih cepat tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dapat di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.
2) **Kesejahteraan Masyarakat**, yang menggambarkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dan sosial,

menikmati pelayanan kebutuhan umum yang baik, dalam perkembangan daerah yang terus meningkat daya saingnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan 5 Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

Misi Pertama

Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah. Misi ini terfokus pada peningkatan kapasitas, kompetensi dan etos profesional aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi yang di emban SKPD.

Misi Kedua

Memperluas dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Ekonomi. Misi ini terfokus pada pengembangan sarana ekonomi vital yang memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan agroindustri, industri pertambangan minyak, gas dan mineral serta volume perdagangan yang kesemuanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dinikmati berbagai unsur masyarakat.

Misi Ketiga

Meningkatkan Akses, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup terkait dengan pembentukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Berbagai upaya tersebut bermuara pada perbaikan kualitas hidup khususnya dengan memperkecil angka penduduk miskin dan pengangguran.

Misi Keempat

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Misi ini terfokus pada upaya melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu, khususnya pada penerapan kurikulum nasional berbasis sekolah, pembinaan moral, budi pekerti, karakter, bahasa, emosional, estetika serta sikap beragama dan spiritual, apresiasi seni-budaya dan pengembangan kreatifitas pemuda dan olahraga serta kesetaraan gender.

Misi Kelima

Penerapan Kebijakan yang berpihak pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi ini terkait dengan upaya pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dan kebijakan yang menjamin daya dukung lingkungan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kelima Misi tersebut di atas juga disebut "**PANCA KARYA PEMBANGUNAN SULAWESI BARAT**", yang secara ringkas di elaborasi menjadi prioritas pembangunan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi;
2. Sarana dan Prasarana;
3. Promosi dan Kerjasama;
4. SDM dan Kualitas Hidup;
5. SDA Lingkungan Hidup.

2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

A. Tujuan Pembangunan Tahun 2012 - 2016 adalah :

1. Mewujudkan kualitas kinerja aparatur yang cerdas dan profesional serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efesien dan produktif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan perekonomian;
3. Mewujudkan akses dan kualitas kesehatan serta kualitas hidup;
4. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan yang utuh dan terpadu dan kualitas SDM yang berdaya saing, berahlak mulia dengan memperhatikan kesetaraan gender dan nilai budaya;
5. Mewujudkan pemanfatan sumber daya alam yang bijaksana dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Sasaran Pembangunan Tahun 2012 – 2016 sesuai dengan masing-masing Misi adalah sebagai berikut :

Sasaran Pembangunan pada Misi 1 :

1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip Good Governance;
2. Optimalisasi perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah, struktur ruang dan pola ruang wilayah;
3. Terwujudnya penatalaksanaan sistem, prosedur maupun tata kerja birokrasi yang berkualitas;

4. Terwujudnya pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan;
5. Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum;
6. Meningkatnya kerjasama antar daerah atau lembaga lainnya dalam pembangunan;
7. Terwujudnya pelayanan prima yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat;
8. Terwujudnya data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi.

Sasaran Pembangunan pada Misi 2 :

1. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi;
2. Terselesaikannya pembangunan bandara Tampa Padang dan sumarorong;
3. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi listrik;
4. Tersedianya infrastruktur irigasi dan air bersih;
5. Tersedianya infrastruktur untuk pengembangan potensi bahari;
6. Terpenuhinya infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan;
7. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar;
8. Meningkatnya volume perdagangan;
9. Terselenggaranya perhubungan darat dan laut;
10. Meningkatnya nilai tukar petani;

11. Meningkatnya nilai tukar nelayan;
12. Meningkatnya keberdayaan pelaku UMKM;
13. Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional.

Sasaran Pembangunan pada Misi 3 :

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;
2. Menurunnya persentase penduduk miskin;
3. Menurunnya persentase pengangguran;
4. Mewujudkan Pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera;
5. Mewujudkan pengarustamaan gender, perlindungan anak dan perempuan serta penanganan PMKS;
6. Peningkatan Taraf Hidup Transmigran.

Sasaran Pembangunan pada Misi 4 :

1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun;
3. Terwujudnya pemberantasan buta aksara;
4. Meningkatnya minat baca masyarakat;
5. Terwujudnya pembangunan Universitas Sulawesi Barat;
6. Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olahraga dan seni;
7. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya budaya.

Sasaran Pembangunan pada Misi 5 :

1. Pemanfaatan potensi tambang dengan memperhatikan kondisi lingkungan;
2. Terselenggaranya percepatan eksplorasi minyak dan gas;
3. Pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan yang berkelanjutan;
4. Berkurangnya luas lahan kritis;
5. Penerapan tata ruang wilayah yang berkelanjutan;
6. Rendahnya tingkat pencemaran dan resiko bencana;
7. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;
8. Pengembangan Kawasan Konservasi DAS.

2.3 Arah kebijakan umum dan pembangunan Sulawesi Barat

Dengan mensinergikan arah kebijakan pembangunan nasional dan memperhatikan sumber daya serta kearifan lokal Provinsi Sulawesi Barat, maka secara garis besar arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang tercermin dalam pelayanan yang semakin profesional dan cerdas serta efesien dan efektif sehingga tingkat layanan kepada masyarakat semakin memuaskan, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif;
2. Arah kebijakan umum untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur, meningkatnya

kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Hal ini di tandai dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan beberapa program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan pangan.

3. Arah kebijakan umum untuk penguatan sumberdaya manusia di bidang kesehatan di tandai dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup masyarakat, dan semakin berkurangnya angka penduduk miskin serta pengangguran.
4. Arah kebijakan umum untuk penguatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan yang di tandai dengan semakin tingginya rata-rata lama sekolah, pendidikan anak usia dini, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, mendorong kesetaraan gender, semakin berkembangnya budaya lokal, meningkatnya kebijakan perlindungan anak dan perempuan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
5. Arah kebijakan umum untuk penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini di tandai dengan semakin kondusifnya daya dukung lingkungan untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang konsisten dengan RTRW Provinsi.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD 2012 - 2016 Provinsi Sulawesi Barat. Berikut IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur .

Tabel 04
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP
2	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi	3. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik 4. Persentase jembatan Provinsi dalam kondisi baik
3	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi listrik	5. Rasio Elektriffikasi
4	Terselenggaranya perhubungan darat,	6. Persentase Arus

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	laut dan udara	Pelayaran 7. Persentase Arus Penerbangan
5	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional	8. Jumlah Wisatawan
6	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	9. Angka kematian Bayi/1000 kelahiran hidup 10. Angka kematian ibu/1000 kelahiran Hidup 11. RS yang terakreditasi 12. RS yang menerapkan SPM RS
7	Menurunnya persentase penduduk miskin	13. Persentase Angka kemiskinan 14. Persentase rumah layak huni 15. Pertumbuhan Ekonomi 16. Pendapatan perkapita (Juta)
8	Menurunnya persentase pengangguran	17. Tingkat pengangguran terbuka % 18. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja %
9	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	19. NTP 20. Produktifitas padi 21. Persentase ketersediaan pangan utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
10	- Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan - Produksi Perikanan (Ton)	22. NTN 23. Produksi Perikanan Tangkap 24. Produksi Perikanan Budidaya
11	Mewujudkan pengarustamaan gender, perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan PMKS	25. Jumlah PMKS yang tertangani
12	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini	26. APK PAUD (%)
13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun	27. APK SD/MI/Paket A (%) 28. APK SMP/MTs/Paket B (%)
14	Terwujudnya pemberantasan buta aksara	29. Angka melek huruf
15	Meningkatnya minat baca masyarakat	30. Indeks minat baca
16	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olahraga dan seni	31. Jumlah kegiatan kepemudaan 32. Jumlah wirausaha muda 33. Prestasi Atlit
17	Berkurangnya luas lahan kritis	34. Luas lahan kritis yang direhabilitasi

2.5 Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016

Penetapan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dalam bentuk Lembar atau Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang di sertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelolanya.

Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 di susun dengan mengacu kepada RPJMD 2012-2016, IKU Pemrov Sulbar dan RKPD 2016. Berikut rincian Perjanjian Kinerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 :

Tabel 05
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP	WTP 70 (B)
2	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi	3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik 4. Persentase jembatan dalam kondisi baik	72,46 100
3	Terselenggaranya percepatan	5. Rasio Elektriffikasi	86,79

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
	pembangunan infrastruktur energi listrik		
4	Terselenggaranya perhubungan darat, laut dan udara	6. Persentase Arus Pelayaran 7. Persentase Arus Penerbangan	2,5 2,5
5	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional	8. Jumlah Wisatawan	27.543
6	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	9. Angka kematian Bayi/1000 kelahiran hidup 10. Angka kematian ibu/1000 kelahiran Hidup 11. RS yang terakreditasi (%) 12. RS yang menerapkan SPM RS (%)	9,93/1000 kh 102/1000 kh 50 50
7	Menurunnya persentase penduduk miskin	13. Persentase Angka kemiskinan 14. Persentase Rumah Layak Huni 15. Pertumbuhan Ekonomi 16. Pendapatan perkapita	9,36 24,67 9 -10 43.15
8	Menurunnya persentase pengangguran	17. Tingkat pengangguran terbuka (%) 18. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (%)	2,01 76,85
9	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	19. NTP 20. Produktifitas padi 21. Persentase ketersediaan pangan utama	116 48,58 22,51
10	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	22. NTN 23. Produksi Perikanan	100 50,524

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
		Tangkap 24. Produksi Perikanan Budidaya	83,518
11	Mewujudkan pengarustamaan gender, perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan PMKS	25. Jumlah PMKS yang tertangani	36,654
12	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini	26. APK PAUD (%)	65,81
13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun	27. APK SD/MI/Paket A (%) 28. APK SMP/MTs/Paket B (%)	97,65 83,17
14	Terwujudnya pemberantasan buta aksara	29. Angka melek huruf	90.00
15	Meningkatnya minat baca masyarakat	30. Indeks minat baca	0,2
16	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olahraga dan seni	31. Jumlah kegiatan kepemudaan 32. Jumlah wirausaha muda 33. Prestasi Atlit	10 40 3 Emas
17	Berkurangnya luas lahan kritis	34. Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	2.549,05

Program yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk mencapai target kinerja indikator adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

3. Penataan regulasi keuangan dan aset barang milik daerah;
4. Peningkatan kapasitas pengelolaan barang milik daerah;
5. Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah;
6. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
7. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
8. Pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan;
9. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan;
10. Peningkatan pelayanan angkutan;
11. Pembangunan jalan dan jembatan;
12. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan;
13. Pengembangan pemasaran pariwisata;
14. Pengembangan destinasi pariwisata;
15. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
16. Perbaikan gizi masyarakat;
17. Obat dan perbekalan kesehatan;
18. Upaya kesehatan masyarakat;
19. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
20. Pengembangan lingkungan sehat;
21. Pencegahan penanggulangan penyakit;
22. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan;
23. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;

24. Standarisasi pelayanan kesehatan;
25. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil & PMKS;
26. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
27. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
28. Peningkatan kesempatan kerja;
29. Perencanaan pembangunan ekonomi;
30. Peningkatan kesejahteraan petani;
31. Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian;
32. Optimalisasi Pengelolaan pemasaran produksi perikanan;
33. Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan;
34. Peningkatan produksi hasil peternakan;
35. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
36. Pembinaan panti asuhan dan jompo;
37. Pengembangan pembangunan kesejahteraan sosial;
38. Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
39. Pendidikan Menengah;
40. Pendidikan anak usia dini;
41. Pendidikan non Formal;
42. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
43. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda;

44. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga;

45. Perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan;

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mengukur tingkat persentase capaian kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1 : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana - (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria penilaian atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala

ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 06
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1.	85-100	Memuaskan
2.	75 - 85	Sangat Baik
3.	65 - 75	Baik
4.	50 - 65	Cukup Baik
5.	30 - 50	Agak kurang
6.	0 - 30	Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016

Berdasarkan hasil pengukuran maka didapatkan tingkat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 07

Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai/Predikat SAKIP	WTP 70 (B)	On proses On proses	- -	- -
2	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi	3. Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik 4. Persentase Jembatan dalam kondisi baik	72,46 100	21,09 65,62	29,10 65,62	Kurang Cukup Baik
3	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi listrik	5. Rasio Elektriffikasi	86,79	84	96,78	Memuaskan
4	Terselenggaranya perhubungan darat, laut dan udara	6. Persentase Arus Pelayaran 7. Persentase Arus Penerbangan	2,5 2,5	5,20 60,66	208 242	Memuaskan Memuaskan
5	Meningkatnya	8. Jumlah Wisatawan	27.543	17.800	64,62	Cukup Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori Capaian
	jumlah wisatawan domestik dan internasional	(Orang)				
6	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	9. Angka kematian Bayi/1000 kelahiran hidup	9,93/1000 kh	20,22/1000 kh	0,36	Kurang
		10. Angka kematian ibu/1000 kelahiran Hidup	102/1000 kh	247/1000 Kh	42,15	Agak kurang
		11. RS yang terakreditasi %	50	57,14 %	95,23	Memuaskan
		12. RS yang menerapkan SPM RS %	50	75 %	100	Memuaskan
7	Menurunnya persentase penduduk miskin	13. Persentase Angka kemiskinan	9,36	11,74	74,57	Sangat Baik
		14. Persentase Rumah Layak Huni	24,67	59,24	240	Memuaskan
		15. Pertumbuhan Ekonomi	9-10	6.03	60,30	Cukup Baik
		16. Pendapatan perkapita (Juta)	43.15	27,54	63,82	Cukup Baik
8	Menurunnya persentase pengangguran	17. Tingkat pengangguran terbuka %	2,01	3,40	30,84	Kurang
		18. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja %	76,85	70,27	91,43	Memuaskan
9	Meningkatnya Nilai Tukar Petani	19. NTP	116	107,70	92,85	Memuaskan
		20. Produktifitas padi	48,58	4,52*	9,30	Kurang
		21. Persentase	22,51	21,06	93,55	Memuakan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori Capaian
		ketersediaan pangan utama				
10	- Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan - Produksi Perikanan (Ton)	22. NTN 23. Produksi Perikanan Tangkap 24. Produksi Perikanan Budidaya	100 50,524 83,518	100,55 57,325 102,518	100,55 113,45 122,74	Memuaskan Memuaskan Memuaskan
11	Mewujudkan pengarustamaan gender, perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan PMKS	25. Jumlah PMKS yang tertangani	36,654	27,059	135,45	Memuaskan
12	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini	26. APK PAUD (%)	65,81	63,74	96,85	Memuaskan
13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun	27. APK SD/MI/Paket A (%) 28. APK SMP/MTS/Paket B (%)	97,65 83,17	106,05 77,06	108,60 92,65	Memuaskan Memuaskan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kategori Capaian
14	Terwujudnya pemberantasan buta aksara	29. Angka melek huruf	90.00	83,21	84,90	Sangat Baik
15	Meningkatnya minat baca masyarakat	30. Indeks minat baca	0,2	0,028	0,14	Kurang
16	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olahraga dan seni	31. Jumlah kegiatan kepemudaan 32. Jumlah wirausaha muda 33. Prestasi Atlit	10 40 3 Emas	8 75 3 Emas	80 187,5 100	Memuaskan Memuaskan Memuaskan
17	Berkurangnya luas lahan kritis	34. Luas lahan kritis yang direhabilitasi	2.549,05	1.659,98	65,12	Cukup Baik

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 :

"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip good governance"

Indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 08

Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Opini BPK	WTP	WTP	Proses	….
2	Nilai/Predikat SAKIP	50,23 (CC)	70 (B)	Proses	….
	Rata – rata capaian				**….**

Pengukuran kinerja atas sasaran ini melalui 2 indikator kinerja belum dapat dilakukan karena kedua indikator masih dalam tahap proses evaluasi/audit. Namun dapat disajikan capaian kinerja tahun sebelumnya, berikut uraian masing-masing indikator :

1. **Opini BPK**

   Opini laporan keuangan Tahun Anggaran 2016 oleh BPK masih dalam proses audit sehingga belum dapat di ketahui hasil capaiannya. Namun demikian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam 2 tahun terakhir 2014 dan 2015 hasil audit BPK dinyatakan Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

   Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang diharapkan menjadi poin penilaian BPK dalam rangka mencapai target kinerja Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui Biro Keuangan dan Aset antara lain :

1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
2) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual;
3) Sebagai salah satu indikator akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah adalah kualitas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang memenuhi prinsip-prinsip wajar, tepat waktu dan di susun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Maka dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016 yang berbasis akrual, kredibel, tepat waktu dan sesuai SAP, maka di susunlah *Laporan Keuangan Interim Berbasis Akrual* yang dilaksanakan pada antar periode pelaksanaan tahun anggaran. Laporan Keuangan Interim dapat di susun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu.
4) Peningkatan penatausahaan aset daerah melalui pengembangan

penataan arsip aset daerah dengan aplikasi (melalui SIGMA dan SIPIPT)

5) Penerapan aplikasi berbasis web based, baik untuk pengelolaan keuangan daerah (melalui e-budgeting, e-finance) maupun pengelolaan aset daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka beberapa pemerintahan yang bersifat kompuren mengalami modifikasi dalam rangka member jaminan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan urusan di masing – masing daerah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang – Undang tersebut terdapat 4 bidang kewenangan yang harus diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi antara lain : (1). Bidang Pendidikan (SMU dan SMK), (2). Bidang ESDM, (3). Bidang Kelautan dan Perikanan, (4). Bidang Kehutanan. Sehingga terjadi peralihan personil, pendanaan dan prasarana serta dokumen (P3D) dari kabupaten/kota ke provinsi. Peralihan ini semestinya sudah selesai tahun 2016 namun sampai dengan laporan keuangan diterbitkan validasi dan verifikasi data belum selesai dilaksanakan sehingga asset – asset tersebut belum diakui sebagai asset pemerintah provinsi dalam laporan keuangan. Meskipun inventarisasi dan validasi baru akan dilaksanakan pada tahun 2017 namun hal ini diyakini tidak akan mempengaruhi opini BPK karena asset – asset tersebut sudah di

ungkap secara memadai dalam laporan keuangan.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2016 sebagai upaya mempertahankan pencapaian kinerja atas indikator ini adalah dengan pelaksanaan beberapa program utama : (1) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, (2) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan, (3) Peningkatan Sistem Informasi pengelolaan keuangan, (4) program penataan regulasi keuangan dan aset barang milik daerah dan, (5) program peningkatan kapasitas pengelolaan barang milik daerah dan (6) Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Juga menjadi salah satu faktor utama yang menunjang pencapaian target indikator ini adalah efektifitas peran aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) yakni dalam hal ini Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melalui pelaksanaan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Memiliki indikator yaitu di manfaatkannya Laporan Hasil Revieu Keuangan oleh BUD untuk perbaikan LKPD, hasilnya sebanyak 1 Rekapitulasi Laporan Hasil Revieu (LHR), dengan capaian kinerja 100%. Total keseluruhan Laporan Hasil Revieu sebanyak 75 Laporan. Ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat diandalkan, di susun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan

revieu ini dapat mendukung tercapainya opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yakni "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Prestasi lain atas pelaksanaan kegiatan ini adalah 2 (dua) tahun berturut-turut (2014 dan 2015) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Rp. 0 (zero) temuan. pelaksanaan revieu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD dilakukan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD di susun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan taat terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

2. Nilai/Predikat SAKIP

Hasil penilaian Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 belum disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Namun dapat disajikan dalam laporan ini bahwa hasil Penilaian tahun 2014 memperoleh predikat C dengan nilai 50,23. Sedangkan di tahun 2015 telah mencapai predikat CC dengan nilai 44,65 ini berarti mengalami peningkatan sebesar 5,58 dibandingkan dengan tahun 2014. Hasil penilaian ini mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Sulawesi barat menunjukkan hasil yang cukup memadai namun masih memerlukan banyak perbaikan. Adapun rincian hasil penilaian dari tahun 2011 - 2015 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 09

Rincian Hasil Penilaian dari Tahun 2011 - 2015

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Perencanaan Kinerja	35	10,13	11,67	8,81	15,28	17,71
2	Pengukuran Kinerja	20	3,6	3,37	4,09	7,29	10,11
3	Pelaporan Kinerja	15	6,63	8,04	7,64	6,48	7,78
4	Evaluasi Kinerja	10	2,43	2,60	5,93	4,63	4,01
5	Capaian Kinerja	20	11,5	9,68	10,78	10,97	10,62
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**34,29**	**35,36**	**37,25**	**44,65**	**50,23**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**C**	**C**	**C**	**C**	**CC**

Sumber : LHE Sistem AKIP Tahun 2015

Kinerja Capaian Penilaian sistem AKIP tersebut di capai melalui pelaksanaan program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan fasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja utama dan Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang

diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber daya manusia ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menerapkan SAKIP.

Juga menjadi salah satu faktor utama yang menunjang pencapaian target indikator ini adalah efektifitas peran aparat pengawasan interen pemerintah (APIP) yakni dalam hal ini Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melalui pelaksanaan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Dengan Sasaran SAKIP dan LKjIP SKPD yang akuntabel indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai hasil Evaluasi AKIP kabupaten se-Prov. Sul-Bar, hasilnya sebanyak 3 LHE (1 Kab. Predikat B, 1 Kab. Predikat C,1 Provinsi predikat CC), sehingga ada predikat yang melebihi target dan ada yang berada di bawah target. Rincian 3 (tiga) Rekapitulasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP untuk 40 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten Polewali Mandar dengan 4 (empat) SKPD sebagai sampel, dan pemerintah kabupaten Mamasa dengan 4 (empat) SKPD sebagai sampel, capaian kinerja sasaran ini sebesar 100%. Total keseluruhan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah sebanyak 45 Laporan yang terbagi atas Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-AKIP) dan Laporan Monev. Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016,

Perolehan nilai hasil Evaluasi AKIP umumnya masih berada pada kategori C, disebabkan karena dokumen perencanaan SKPD yang memuat sasaran dan indikator sebagian besar masih belum menggambarkan *outcome*/hasil dan Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon III dan IV belum di buat. Dengan di bentuknya SATGAS SAKIP pada Inspektorat diharapkan dapat menjadi klinik bagi seluruh *stakeholders*, untuk meningkatkan kualitas Sistem AKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kendala yang di hadapi adalah masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kendala tersebut di atasi dengan meningkatkan koordinasi untuk memaparkan kelemahan-kelemahan umum yang terdapat dalam Laporan Kinerja sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang, kegiatan pelatihan Kantor Sendiri juga salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman para Evaluator yang akan mengevaluasi LKjIP Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengikutsertakan pegawai dari Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dilakukan sebanyak 13 kali sepanjang Tahun 2016, selain itu beberapa anggota pokja diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pusat serta mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadi narasumber kegiatan internal Inspektorat yakni Pelatihan Kantor Sendiri.

Permasalahan dan kendala yang di temui dalam pencapaian target kinerja Tahun 2016 sehingga keberhasilan yang di capai belum maksimal adalah:

1) Renstra SKPD belum sepenuhnya memuat dan menetapkan hal-hal yang hendak di capai dalam jangka menengah;
2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyusun rencana aksi atas kinerja sesuai dengan komitmen yang terdapat dalam dokumen perjanjian Kinerja;
3) Indikator Kinerja Utama SKPD belum sesuai dengan prinsip SMART;
4) Laporan kinerja belum maksimal dalam memberikan informasi evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja;
5) Komitmen terhadap pencapaian kinerja atas dokumen – dokumen kinerja yang telah di tetapkan terutama yang berhubungan dengan capaian outcome masih perlu ditingkatkan.

Sebagai solusi untuk masalah yang di hadapi dalam meningkatkan kinerja indikator ini adalah :

a. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang SAKIP yang dilanjutkan dengan *desk* (asistensi) secara bergantian pada masing-masing SKPD sehingga permasalahan pada masing-masing SKPD bisa diselesaikan secara kasuistik;

b. Pelaksanaan asistensi pada SKPD masing-masing untuk mempertajam dari sisi perencanaan sampai dengan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
c. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada masing-masing SKPD oleh tim evaluasi SAKIP yang terdiri dari unsur Biro Organisasi, Inspektorat, Bappeda dan Biro Keuangan;
d. Pemberian rekomendasi-rekomendasi terkait hasil evaluasi SAKIP SKPD;
e. Pengusulan pembentukan Tim SAKIP SKPD dan pengusulan anggaran khusus kepada Bappeda untuk pembiayaan Tim SAKIP pada masing-masing SKPD;
f. Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan SAKIP sehingga tercipta keseragam.

Sasaran 2 :

"Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Untuk Kelancaran Transportasi ke Pusat-Pusat Produksi"

Indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel10

Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik	14,21	72,46	21.09	29,10
2	Persentase jembatan provinsi dalam kondisi baik	65,63	100	65,63	65,63
	Rata-rata Capaian Kinerja				**47,36**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas sasaran ini melalui indikator kinerja persentase jalan Provinsi dalam keadaan baik dan persentase jembatan dalam keadaan baik maka dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sebesar 47,36 % dengan kategori capaian **Agak Kurang**.

Persentase jalan provinsi dalam keadaan baik, kurangnya capaian indikator ini dikarenakan banyak faktor terutama meskipun rehabilitasi/pembangunan jalan selalu dilakukan setiap tahunnya tapi jalan yang dahulunya baik juga banyak mengalami kerusakan, ini menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan koordinasi antara Kepala Bidang Bina Marga dengan Kepala UPTD PSDAL & PM dalam menerapkan uji lab pekerjaan fisik sehingga tidak didapatkan lagi pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai oleh Pihak ketiga (kontraktor) dengan hasil uji lab yang didapatkan. Faktor lain adalah

adanya rasionalisasi anggaran pada tahun 2016 sehingga jalan yang direncanakan mendapatkan perbaikan, tidak dapat dikerjakan.

Semenjak Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada tahun 2004, pembangunan yang gencar dilakukan pemerintah salah satunya adalah pembangunan dalam upaya memperbaiki dan menambah fasilitas jalan. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2012 – 2016 panjang jalan di Sulawesi barat terus mengalami perubahan. Total panjang jalan Provinsi dan Strategis Provinsi secara keseluruhan pada tahun 2016 mencapai 349, 67 km yang terdiri dari : jalan dalam kondisi baik sepanjang 73,78 km, jalan dalam kondisi rusak ringan 133,92 km dan jalan dalam kondisi rusak berat 141,97 km.

Berikut lokasi yang pada tahun 2016 ini mendapatkan perbaikan/pembangunan jalan :

1. Pelebaran/Perkerasan jalan ruas Salu Tambung – Urekang;
2. Pelebaran/perkerasan jalan ruas Mambi – Urekang;
3. Pelebaran/Perkerasan jalan Keppe – Matangnga segmen Pasembu – Matangnga;
4. Peningkatan jalan ruas Tabone – Nosu;
5. Peningkatan jalan ruas Mapilli – Piriang;
6. Pelebaran/Perkerasan jalan ruas Sumare – Batas Tapalang Barat;
7. Peningkatan jalan ruas akses Pelabuhan Budong – Budong;

8. Rehabilitasi jalan ruas Puawang – Katitting Polewali;

9. Pengerasan jalan poros Besoangin Tibung Ratte Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 01 : Peningkatan Jalan Ruas Mapilli – Piriang Segmen I

Gambar 02: Rehabilitasi Jalan Ruas Puawang - Katitting

Persentase jembatan dalam keadaan baik, capaian indikator ini sebesar 65,63 % dari target yang ditentukan sebesar 100 %. Total jumlah jembatan yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 32 jembatan dengan kondisi baik berjumlah 21 unit dan rusak sebanyak 11 unit, masing – masing berada pada :

1. 2 (dua) jembatan pada ruas jalan Batuisi – Batas Toraja, dengan kondisi rusak;
2. 16 (enam belas) jembatan pada ruas jalan Lampa (Mapilli) – Matangnga, dengan kondisi 14 (empat belas) status baik dan 2 (Dua) status rusak;
3. 6 (enam) jembatan pada ruas jalan Matangnga – Keppe, dengan kondisi 4 (empat) status baik dan 2 (dua) status rusak;
4. 4 (empat) jembatan pada ruas jalan Salutambung – Urekang, dengan kondisi 1 (satu) status baik dan 3 (tiga) status rusak;

5. 2 (dua) jembatan pada ruas jalan Urekang – Mambi, dengan kondisi 1 (satu) status baik dan 1 (satu) status rusak;
6. 2 (dua) jembatan pada ruas jalan Tikke – Batas Sulteng, dengan kondisi 1 (satu) status baik dan 1 (satu) status rusak.

Sasaran 3 :

"Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Energi Listrik"

Indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 11

Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio Elektrifikasi	82,3	86,79	84	96,78
	Rata-rata Capaian				**96,78**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas sasaran ini melalui indikator kinerja Rasio Elektrifikasi maka dapat disimpulkan rata-rata capain kinerja sebesar 96,78 % dengan kategori capaian **Memuaskan**.

Rasio Elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah total rumah tangga yang berlistrik di bagi dengan total rumah tangga yang ada. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bahwa sampai dengan tahun 2016 rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 84% dibandingkan dengan capaian 2015 di mana rasio elektrifikasi

mencapai 82,3% maka ada peningkatan sebesar 1,7%. berikut disajikan tabel rasio elektrifikasi Sulawesi Barat :

Tabel 12 Rasio Elektrifikasi

Kabupaten	Jumlah					Rasio Elektrifikasi	
	PPDK	RT/KK	Jumlah Pelanggan	Nyala Non Pelanggan	Jumlah Keseluruhan Pelanggan	Elektrifikasi Keseluruhan	RE Pelanggan PLN
1	2	3	4	5	6	6=4+5/3x100	7=4/3x100
Mamuju	265.800	86.408	41.568	16.489	58.057	67	48
Majene	163.896	33.504	31.677	1.280	32.957	98	95
Polman	422.793	94.291	76.469	9.874	86.343	92	81
Mamasa	151.825	33.920	8.945	18.728	27.673	82	26
Matra	156.464	35.200	17.970	15.037	33.007	94	51
Sulbar	**1.160.778**	**283.323**	**176.629**	**61.408**	**238.037**	**84**	**62**

Sumber : Dinas ESDM Prov Sulbar 2017

Sedangkan rasio desa berlistrik saat ini sudah mencapai 46 % dari jumlah total desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jika di lihat dari Kabupaten maka Kabupaten Majene merupakan kabupaten yang berlistrik mencapai 93 % sedangkan Kabupaten dengan rasio desa berlistrik masih rendah adalah Kabupaten Mamasa 27 %.

Tabel 13 Rasio Desa Berlistrik

Kab	Kecamatan		Jumlah	Kelurahan		Jumlah	Desa		Jumlah	Rasio desa berlistrik
	Berlistrik	Belum		Berlistrik	Belum		Berlistrik	Belum		
1	**2**	**3**	**4=2+3**	**5**	**6**	**7=5+6**	**8**	**9**	**10=8+9**	**11=5+8/7+10X100**
Mamuju	14	1	15	11	0	11	38	104	142	32
Majene	8	0	8	14	0	14	23	3	26	93
Polman	16	0	16	23	0	23	78	66	144	60
Mamasa	17	0	17	11	0	11	37	127	164	27
Matra	12	0	12	4	0	4	16	43	59	32
Mateng	5	0	5	0	0	0	47	9	56	84
Sulbar	**72**	**1**	**73**	**63**	**0**	**63**	**239**	**352**	**591**	**46**

Sumber : Dinas ESDM Prov Sulbar 2017

Kebijakan Pemerintah Sulawesi Barat dalam meningkatkan Kinerja Capaian sasaran pada tahun 2016 melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kegiatan :

1. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan;
2. Survey potensi energi baru terbarukan;
3. Study kelayakan pembangunan PLTMH dan Detail Engineering Design (DED).

Sasaran 4 :

"Terselenggaranya Perhubungan Udara, Darat dan Laut"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 14

Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Arus Pelayaran	217	2,5	5,20	208
2	Persentase Arus Penerbangan	2,3	2,5	60,66	242
	Rata-rata Capaian				225

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas sasaran ini melalui 2 indikator kinerja maka dapat disimpulkan rata-rata capain kinerja sebesar 225 % dengan kategori capaian **Memuaskan**. Berikut uraian masing-masing indikator :

1. **Persentase Arus Pelayaran**

Aktifitas pelayaran pada tahun 2016 yang ada di Sulawesi Barat yang terdiri dari Pelayaran Nasional, Pelayaran Umum, Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Luar Negeri sebanyak 6.283 pelayaran. Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 5.972 pelayaran. Ini berarti ada kenaikan 5,20%, sesuai target yang telah ditetapkan 2,5% maka capaian kinerja indikator ini 208%. Untuk pelayaran luar negeri masih sebatas pada pengangkutan hasil olahan CPO ke luar negeri.

Tabel 15 Jumlah Pelayaran Menurut jenis pelayaran tahun 2015–2016

Tahun	Pelayaran Nasional	Pelayaran Umum	Non Pelayaran	Pelayaran Rakyat	Pelayaran Luar Negeri
2015	1.358	2.959	n.a	1.601	54
2016	1.283	3.110	n.a	1.827	63

Sumber : Dinas Perhubungan 2017

Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan infrastruktur transportasi laut, tercatat di tahun 2016 terdapat 5 pelabuhan yang senantiasa beroperasi, masing-masing berada di Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dua pelabuhan di Kabupaten Mamuju dan di mamuju Tengah. Dengan demikian kinerja indikator ini sudah sesuai target yang direncanakan.

Pelabuhan belang-belang yang terletak di Mamuju Tengah merupakan pelabuhan yang menjadi perhatian utama pemerintah Provinsi Sulawesi

Barat. Perkembangan infrastruktur dermaga ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2006 dermaga ini di perpanjang menjadi 62 meter yang tadinya hanya 40 meter dengan perpanjangan ini dapat mengakomodasi kapal yang berukuran lebih besar. Peningkatan fasilitas pelabuhan belang-belang merupakan program utama pembangunan. Di tahun 2008 panjang dermaga menjadi 101 meter dan mampu melayani kapal yang berbobot 10.000 ton. Masa RPJMD 2012 – 2016 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan peningkatan fasilitas pelabuhan belang–belang dengan target fasilitas dermaga kontainer yang dijadwalkan rampung pada tahun 2016. Hal ini diharapkan makin meningkatkan aksebilitas wilayah dalam rangka mendukung pembangunan sektor lain yang pada akhirnya akan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi barat.

Pelabuhan Ferry yang terletak di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan status beroperasi, pelabuhan ini melayani angkutan penumpang dan barang rute mamuju Balikpapan yang di layani oleh dua perusahaan angkutan.

Pelabuhan Silopo di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang difungsikan untuk mendukung pengangkutan barang dan hasil bumi di Sulawesi Barat dengan kapasitas 1000 ton. Pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yang diperuntukkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja indikator ini melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Silopo.

2. Persentase Arus Penerbangan

Aktifitas Bandar udara tampa padang dan Bandara Sumarorong selama tahun 2016 jumlah pesawat datang maupun berangkat mencapai 1.152. bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 717 maka ada peningkatan sebesar 435 penerbangan, dengan hasil ini menunjukkan bahwa aktifitas bandara mengalami perkembangan yang sangat baik, Aktifitas Bandar udara tampa padang mamuju dan Sumarorong tahun 2012 – 2016 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Aktivitas Bandar udara tampa padang mamuju tahun 2012 – 2016

TAHUN	PESAWAT (Unit)		PENUMPANG (Orang)		BAGASI (Ton)	
	BERANGKAT	TIBA	BERANGKAT	TIBA	MUAT	BONGKAR
2012	613	613	27.772	25.752	125.692	150.083
2013	499	499	25.043	23.610	108.080	122.950
2014	700	700	28.644	27.453	134.510	118.114
2015	717	717	31.403	28.532	136.995	155.457
2016	1.152	1.152	68.400	68.400	306.516	437.100

Sumber : LKjIP Dinas Perhubungan 2016

Salah satu faktor yang menjadi sebab kenaikan signifikan atas indikator ini adalah beroperasinya Bandara Udara Sumarorong yang ada di

Kabupaten Mamasa. Hingga tahun 2016 telah ada 2 (dua) Bandara di Provinsi Sulawesi Barat yang beroperasi yakni Bandar Udara Tampa Padang dan Bandar Udara Sumarorong yang berada di Kabupaten Mamasa yang diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 10 maret 2014.

Bandar Udara Tampa Padang termasuk bandara kelas IV A dengan fungsi sebagai bandara penumpang (bandara pengumpul/penumpang lokal) hingga saat ini peningkatan fasilitas dan pelayanan masih menjadi program utama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk dikembangkan. Dari hasil pembangunan fasilitas yang ada di ikuti oleh meningkatnya animo masyarakat untuk melakukan perjalanan melalui transportasi udara terus meningkat setiap tahun. Hal ini nyata dari meningkatnya maskapai penerbangan yang beroprasi di Bandar udara tampa padang. Jikalau pada awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004 bandar udara tampa padang hanya di layani oleh penerbangan perintis maka sejak tahun 2007 maskapai penerbangan komersil seperti merpati, express air dan wings air telah beroprasi di Bandar udara ini.

Sementara Bandar Udara Sumarorong di Kabupaten Mamasa resmi beroperasi pada tanggal 11 maret 2014 dengan menyediakan penerbangan perintis rute Makassar – sumarorong – mamuju sebanyak satu kali dalam sepekan. Pembangunan bandara ini di mulai sejak tahun 2011 dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten mamasa dan Kementerian perhubungan. Di tahun 2014 bandara ini sudah

memiliki fasilitas landasan sepanjang 900 m dan lebar 30 m dan sudah dapat di darati pesawat tipe CASA-212. Diharapkan dengan adanya sarana transportasi udara ini mendorong peningkatan aksebilitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja indikator ini melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan dengan kegiatan

- Peningkatan Prasarana Pembangunan Fasilitas Transportasi;
- Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Fasilitas Bandar Udara Sumarorong.

Sasaran 5

"Meningkatnya Jumlah Wisatawan Domestik dan Internasional"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel17

Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah wisatawan	31.969	27.543	17.800	64,62
	Rata – rata capaian				**64,62**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas sasaran ini melalui indikator kinerja jumlah wisatawan maka dapat disimpulkan rata-rata capain kinerja sebesar 64,62 % dengan kategori capaian **Cukup Baik**.

Target jumlah wisatawan untuk tahun 2016 adalah 27.543 orang namun realisasi di akhir tahun hanya mencapai 17.800 orang. Nilai ini di peroleh melalui purposive sampling atas 4 obyek wisata. Cara perhitungannya adalah dengan menyesuaikan penjualan retribusi yang di jual oleh pengelola obyek wisata. Adapun obyek wisata yang menjadi sampling adalah Taman wisata gentungan, pulau karampuang, permandian So'do dan air terjun tamasapi.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yang mencapai 31,969 maka terjadi penurunan sekitar 14.165. Penurunan ini disebabkan adanya rasionalisasi anggran pada tahun 2016 sehingga ada beberapa kegiatan kepariwisataan yang tidak dilaksanakan. Dan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yang ditargetkan 27,543 maka capaian indikator ini sebesar 64,62%.

Pada tahun sebelumnya Jumlah Wisatawan yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah data kunjungan pariwisata yang di peroleh dengan cara proyeksi dengan melihat trend data tiga tahun sebelumnya. Namun mulai tahun 2014 data yang digunakan adalah data dari UPTD Taman Wisata Gentungan sebagai sampel untuk merepresentasikan dari jumlah kunjungan wisatawan di Sulawesi Barat. Langkah ini sengaja di ambil untuk mengeliminasi bias data yang

sering terjadi jika hanya mengandalkan trend data. Namun sejak tahun 2015 teknik pengumpulan data yang dilakukan di ubah menjadi sistem purporsive terhadap beberapa jumlah objek wisata di Sulawesi Barat. Meskipun hanya menggunakan empat objek wisata sebagai sampling pendataan kunjungan wisata namun perhitungan terhadap keempatnya adalah perhitungan kunjungan wisata yang mempresentasikan jumlah capaian seluruh kunjungan wisata di Sulawesi Barat.

Tabel 18
Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2016
Dengan Purposive Sampling

No	Objek Wisata	Jumlah pengunjung tahun	
		2015	2016
1	Taman wisata gentungan	11.475	10,850
2	Permandian So'do	10.325	4,950
3	Rumah adat mamuju	7.536	500
4	Pulau Karampuang	2.633	1,500
Total		**31.969**	**17.800**

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2017

Upaya yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2016 dalam meningkatkan pencapaian kinerja indikator ini adalah dengan pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata dengan melakukan beberapa kegiatan yakni :

1) Pengembangan objek pariwisata unggulan (UPTD wisata gentungan);
2) Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;

3) Pelaksanaan event pariwisata Sulawesi Barat;

4) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri;

Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja pariwisata adalah PDRB sektor pariwisata. Indikator ini baru ditetapkan pada revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, meskipun demikian dalam laporan kinerja ini dapat disajikan realisasi atau capaian PDRB dari sektor wisata melalui data ekspose BPS Sulawesi Barat adalah Akumulasi realisasi capaian PDRB dari sektor wisata sejak tahun 2012 hingga 2016 adalah sekitar Rp 998,990,140,000. Dengan uraian realisasi tahun 2012 adalah Rp 5,550,000,000,-, Tahun 2013 Rp 7,216,140,000,-, tahun 2014 Rp 7,224,000,000,- dan tahun 2015 Rp 392,800,000,000 ,- dan di tahun 2016 realisasi PDRB dari sektor wisata sebesar Rp. 586,200,000,000,-.

Sasaran 6 :

"Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 19

Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka kematian bayi/ 1000 kh (%)	10,51/1000 kh	9,93/1000kh	20,22/1000kh	0,36
2	Angka kematian ibu/1000 kh (%)	216/1000 kh	102/1000 kh	247/1000kh	42,15
3	Persentase RS yang terakreditasi	50	60	57,14	95,23
4	Persentase RS yang menerapkan SPM	50	75	75	100
	Rata – rata capaian				**59,43**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas sasaran ini melalui 4 indikator kinerja, 2 bermakna progres negatif dan 2 lainnya progres positif maka dapat disimpulkan rata-rata capain kinerja sebesar 59,43 % dengan kategori capaian **Cukup Baik** Berikut uraian masing-masing indikator :

1. **Angka Kematian Bayi / 1000 kelahiran bayi**

Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) yang di ukur adalah jumlah bayi (0-12 bulan) yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada kurun waktu satu tahun. Angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 20,22 per 1000 kelahiran hidup bayi dari target yang telah ditetapkan sebesar 9,93 per 1000 kelahiran hidup bayi. maka

capaian sasaran indikator ini hanya sebesar 0,36 % dari target yang ditentukan.

Dibandingkan dengan tahun 2015 kinerja indikator Angka kematian bayi yang berada pada angka 10,51 per 100 kelahiran hidup, ini berarti ada kenaikan jumlah angka kematian bayi sekitar 100% pada tahun 2016. Namun bila dibandingkan dengan target Nasional dalam RPJMN, 24 per 1000 kelahiran hidup, maka AKB Provinsi Sulawesi Barat sudah melampaui target Nasional, demikian juga bila dibandingkan dengan target yang diharapkan dalam MDG's (*Millennium Development Goals)* tahun 2015 yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 247 per 1000 kelahiran hidup dari target yang telah ditetapkan sebesar 102 per 1000 kelahiran hidup maka capaian sasaran indikator ini adalah sebesar 42,15% dari target yang ditentukan. Ini berarti Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 102 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016 belum mencapai terget yang diharapkan. Tercatat bahwa pada tahun 2016 jumlah kematian ibu sebanyak 52 kasus kematian. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 42 kasus. Bila dibandingkan dengan target MDG's 2015 sebesar 102 per 1000 kelahiran hidup, maka penurunan AKI di Sulawesi Barat dapat dikatakan belum berhasil.

Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau bersalin per 100.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan. Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki data statistik vital yang langsung dapat menghitung Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah Kematian Ibu didapatkan dengan mengumpulkan informasi dari Puskesmas semasa kehamilan, persalinan atau selama melahirkan. Seperti indikator kesehatan lain pada umumnya, terdapat perbedaan AKI antar wilayah di Sulawesi Barat. Berdasarkan data Jumlah Kematian Ibu di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten dengan Penyumbang terbesar Kematian Ibu dengan Jumlah Kasus Kematian 11 Kasus.

Banyak faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus kematian Ibu “4 terlalu dan 3 terlambat”. Yakni, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, terlalu banyak, terlambat

mencapai fasilitas, terlambat mendapatkan pertolongan, dan terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan.

Masyarakat, terutama para ibu, perlu mendapatkan lebih banyak informasi mengenai kehamilan dan persalinan, serta (dan ini sangat penting) memahaminya dengan benar. Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang sangat tidak merata juga perlu di perbaiki. Saat ini, banyak ibu hamil harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang fasilitasnya juga belum tentu lengkap. Ini salah satu pemicu utama tingginya kematian Ibu.

Salah satu strategi yang digalakkan oleh Pemerintah Sulawesi Barat adalah dengan menggalakkan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dalam mendorong Program Rumah Tunggu Persalinan yang diharapkan dapat mendekatkan ibu hamil ke sarana pelayanan Kesehatan. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu diantaranya: di tingkat Provinsi, 1) Dinas Kesehatan Provinsi membentuk tim *audit external* dari campion dan mentor untuk ditugaskan melakukan revieu/ audit kematian ibu, 2) *Mapping* alur system rujukan yang melibatkan semua fasilitas kesehatan (Rumah sakit & Puskesmas) di ikat perjanjian kerjasama sistem rujukan kegawatdaruratan ibu & bayi baru lahir, 3) Membangun di alog Bupati dan Kadinkes, Direktur RS dan para dokter spesialis kebidanan, anak, dll, untuk perbaikan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru

lahir, 4) Menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Meningkatkan upaya promosi kesehatan pencegahan kematian ibu dengan penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, serta meningkatkan kemampuan strategi promosi kesehatan penurunan AKI (di mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev) bagi petugas promkes dan kepala puskesmas.

3. Persentase RS yang terakreditasi

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, curative dan rehabilitative yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit yang terakreditasi adalah rumah sakit dengan standar pelayanan yang telah mendapatkan pengakuan oleh lembaga khusus yang menangani masalah rumah sakit.

Tabel 20

Data Rumah Sakit di Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN	RUMAH SAKIT	PEMILIK
1	Majene	RSUD Majene	Pemerintah Kabupaten Majene
2	Polewali Mandar	RSUD Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3	Mamasa	RSUD Kondosapata Mamasa	Pemerintah Kabupaten Mamasa
		RS Banua Mamasa	Gereja
4	Mamuju	RS Regional	Pemda Provinsi
		RSUD Mamuju	Pemerintah Kabupaten Mamuju
		RS Mitra Manakarra	Swasta
5	Mamuju Utara	RSUD Mamuju Utara	Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi tahun 2016 mengalami peningkatan dari 50 Persen pada tahun 2015 menjadi 57,14 di tahun 2016, Rumah sakit yang baru terakreditasi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Majene, Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong Rumah Sakit memiliki

akreditasi. Kegiatan tersebut antara lain bimbingan dan survey akreditasi RS, Visitasi penetapan dan peningkatan kelas rumah sakit.

Pada tahun 2016 rata-rata Rumah Sakit sementara berproses untuk mendapatkan akreditasi dari komite akreditasi rumah sakit. Upaya yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang untuk menjadikan rumah sakit yang terakreditasi mencapai target dapat mengusulkan anggaran pengembangan Rumah Sakit lewat Dana Alokasi Kesehatan/ DAK dengan data yang kuat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain itu Provinsi Sulawesi Barat juga telah berupaya untuk mengadvokasi kabupaten untuk mendorong Rumah Sakit dalam mendorong Rumah Sakit terakreditasi dan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4. Persentase Rumah Sakit Provinsi / Kabupaten yang menerapkan SPM RS

Rumah sakit yang telah melaksanakan SPM rumah sakit pada tahun 2016 sebesar 75 %. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga secara minimal.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mendorong Rumah Sakit melaksanakan SPM rumah sakit dengan melakukan kegiatan - kegiatan di antaranya :

1. Perencanaan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan;
2. Monitoring dan Evaluasi Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan;
3. Peningkatan Program PONEK di Rumah Sakit;

4. Pelatihan Perawatan Pelaksana Perkesmas;
5. Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar;
6. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan lokasi bangun mandar;
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan DTPK.

Sasaran 7

"Menurunnya Persentase Penduduk Miskin"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 21

Capaian Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase angka kemiskinan	11,90	9,36	11,74	74,57
2.	Persentase Rumah Layak Huni	-	24,67	59,24	240
2	Pertumbuhan ekonomi	7,37	9-10	6,03	60,30
3	Pendapatan perkapita (juta)	23,36	43.15	27,54	63,82
	Rata – rata capaian				**66,23**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan 3 indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 66,23% dan tergolong **Baik** Berikut uraian masing-masing indikator :

1. **Persentase angka kemiskinan**

Realisasi kinerja Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 11,74%, dengan angka kemiskinan mencapai 146.900 jiwa. Capaian kinerja indikator ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 berarti mengalami penurunan sebesar 0,16 persen.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengurangi persentase penduduk miskin adalah dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program penuntasan kemiskinan, Pemerintah menciptakan lapangan pekerjsaan di berbagai sektor. Mengadakan berbagai macam bentuk pelatihan (Bimtek) peningkatan industri kecil dan menengah, pelatihan IKM, pelatihan sektor pertanian, peternakan, perkebunan yang mana dengan pengadaan pelatihan ini dapat menambah daya saing dan kreatifitas masyarakat dalam mengelolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga menghasilkan nilai yang lebih baik dan mampu mengangkat taraf kehidupannya. Selain itu juga pelaksanaan program jaminan kesejahteraan terhadap fakir miskin dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, pengadaan usaha ekonomi produktif bagi KTK dan PM dan pemberian bibit pertanian bagi warga komunitas adat terpencil.

2. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 6,03 % sehingga persentase capaian atas indikator adalah sebesar 60,30 %. Perekonomian Sulawesi Barat 2016 di ukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 9.239,30 milyar rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 7.013,79 milyar rupiah. Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa kinerja perekonomian dari seluruh lapangan usaha di sulawesi Barat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Kondisi perekonomian Sulawesi Barat secara menyeluruh masih menunjukkan perkembangan yang positif. Ekonomi Sulawesi Barat secara kumulatif tahun 2016 tumbuh hingga 5,67 persen. dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi di capai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 19,00 persen dengan konstribusi total pertumbuhan sebesar 1,66 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi di capai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai sebesar 20,07 persen, pertumbuhan ini memberikan konstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 3,36 persen.

Pada tahun 2014 aktifitas ekonomi Sulawesi Barat yang di ukur dari PDRB mencapai Rp 29,392 triliun menurut harga berlaku atau Rp 24,169 menurut harga konstan dan PDRB perkapita mencapai Rp 23,36 juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang cukup

signifikan di tandai dengan menggeliatnya sektor-sektor ekonomi. Perlambatan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2013 yang dikawatirkan berlanjut sebagai imbas perekonomian global berganti dengan trend positif.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor adalah dengan pelaksanaan program Penguatan Ekonomi Daerah seperti :

1) Meningkatkan jumlah produk regulasi di bidang perekonomian sampai dengan tahun 2016;
2) Meningkatkan jumlah data pelaku ekonomi produktif di berbagai sektor;
3) Koordinasi pengembangan promosi dan pemasaran produk khas daerah;
4) Pengembangan sistem informasi terpadu data perekonomian;
5) Monitoring harga sembako;
6) Rapat koordinasi dan teknis pemantauan dan pengendalian inflasi daerah.

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 27,54 juta atas dasar harga berlaku, adapun target yang ditentukan pada tahun 2016 sebesar 43.15 juta, maka capaian kinerja indikator ini adalah 27,54 % dari target yang ditentukan.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 dimana pendapatan perkapita mencapai 20,26, maka ada peningkatan sebesar 7,28 & PDRB perkapita penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000

senantiasa mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2012 hingga tahun 2016.

Sasaran 8

" Menurunnya Persentase Pengangguran"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 22

Capaian Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	2,08	2,01	3,40	30,84
2	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK)	71,06	76,85	70,27	91,43
	Rata – rata capaian				**61,13**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan 2 indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 61,13% dan tergolong **Cukup Baik,** Berikut uraian masing-masing indikator :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran. TPT memberikan indikasi besarnya

penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.

Jumlah penduduk yang bekerja dengan kriteria pekerja tidak penuh tahun 2016 cukup banyak di Sulawesi Barat yaitu sebanyak 259,6 ribu orang atau sekitar 41,59 persen dari total pekerja. Penduduk yang bekerja sebanyak 624,2 ribu orang dan yang menganggur sebanyak 21,5 ribu orang. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2016 sebesar 3,40 %, yang artinya dari sekitar 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja 3 orang di antaranya adalah pengangguran.

Selama kurun waktu periode RPJMD 2012 - 2016 dapat dijelaskan bahwa TPT di Sulawesi Barat cenderung meningkat di mana pada Agustus 2012 sebesar 2,14 % menjadi 3,40 % pada Agustus 2016. Persentase penduduk usia kerja yang menganggur tertinggi di Kabupaten Majene yaitu sebanyak 5,51 persen dan terendah di Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 1,44. Berikut tabel penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama:

Tabel 23

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat Menurut Kabupaten Tahun 2012 - 2016

Kabupaten	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Majene	36,46	3,15	2,33	2,06	5,51
Kabupaten Mamuju	2,63	1,02	1,23	1,03	3,78
Kabupaten Polman	3,14	2,18	3,24	2,98	3,66
Kabupaten Mamasa	2,65	3,37	2,95	2,27	1,92
Kabupaten Mateng	-	-	-	2,92	2,95

Kabupaten Matra	1,90	2,45	2,08	2,15	1,44
Jumlah	2,84	2,14	2,35	2,08	3,40

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar

Indikator ini bila dibedakan menurut tempat tinggal TPT perdesaan lebih rendah dari perkotaan. hal ini disebabkan karena sektor potensial yang masih menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk Sulawesi Barat terdapat di pedesaan sehingga pengangguran lebih sedikit di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan.

Lapangan usaha pertanian merupakan penyerap terbesar tenaga kerja di Sulawesi Barat. jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini sebanyak 310,6 ribu orang atau sebesar 49,76 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Pekerja di Sulawesi Barat masih di dominasi oleh pekerja berpendidikan rendah (SLTP ke bawah), yaitu sebanyak 434,4 ribu atau sekitar 69,60 %. Selanjutnya pekerja yang berpendidikan menengah (SMA dan SMK) sebanyak 124,5 ribu atau 19,94 % dan yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma dan PT) sebanyak 65,3 ribu orang atau 10,46 %. besaran persentase pekerja informal di Sulawesi Barat mencapai 70,15 % dari total pekerja yang ada atau sebanyak 437,8 ribu orang. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2015, terjadi penurunan pekerja informal sebanyak 1,2 ribu atau turun sebesar 0,28 %.

Adapun TPT menurut tingkat pendidikan di Sulawesi Barat cenderung tinggi untuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sekitar 2,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih sulit

mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan untuk pendidikan yang lebih tinggi terbatas. Berbeda dengan jenis pekerjaan untuk penduduk berpendidikan rendah yang tidak memerlukan keterampilan khusus sehingga membutuhkan pekerja dalam jumlah besar. Sedangkan TPT menurut daerah tempat tinggal lebih tinggi di daerah perkotaan sekitar 3,15 %.

Usaha yang dilakukan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah dengan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat yang mana dari kegiatan ini menghasilkan terciptanya pekerjaan untuk menanggulangi pengangguran, setengah menganggur sebanyak 2.940 orang melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendayagunaan tenaga kerja, terlatihnya 50 orang pada pelatihan tenaga berbasis kompetensi di BLK Sulawesi Barat serta meningkatnya produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan produktifitas tenaga kerja berbasis perusahaan, UKM dan LPKS. Dan terlatihnya 35 orang masyarakat dalam pelatihan berbasis masyarakat serta terlatihnya 35 orang wirausaha baru. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelayanan penempatan tenaga kerja (Bursa Kerja) di enam Kabupaten Kota. Dari pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan 110 orang peserta pelatihan yang diharapkan mampu berwirausaha.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk

menganalisa partisipasi angkatan kerja. Jumlah Penduduk usia kerja di Sulawesi Barat tahun 2016 sebanyak 898,0 ribu orang. Penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai angkatan kerja sebanyak 645,7 ribu orang. Dengan kata lain, TPAK di Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 71,90 %. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja, sekitar 72 orang di antaranya aktif dalam kegiatan ekonomi baik sebagai pekerja atau pencari kerja. Trend capaian indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Barat dalam periode RPJMD 2012 - 2016 dapat di lihat pada tabel pencapaian indikator di atas. Berikut tabel penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama:

Tabel 24

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Barat Menurut Golongan Umur Tahun 2012 - 2016

Golongan Umur	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
15 - 19	38,29	40,87	31,06	33,27	34,11
20 – 24	67,01	67,19	58,95	67,12	70,91
25 - 29	80,40	79,50	73,77	78,98	77,30
30 - 34	83,82	83,51	80,27	84,96	79,42
35 - 39	83,14	84,49	77,90	85,82	82,99
40 – 44	87,47	84,80	85,23	85,14	85,92
45 – 49	89,57	88,00	84,97	88,00	83,78
50 – 54	84,88	81,24	83,68	86,40	81,06
55 – 59	75,94	77,56	76,60	78,36	78,55
60 – 64	66,44	73,71	59,51	69,33	63,61
65 +	48,61	42,05	42,62	46,12	43,09
Jumlah	**72,27**	**71,73**	**66,83**	**71,06**	**70,27**

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar tahun 2017

Indikator ini bila dibedakan menurut tempat tinggal TPAK perdesaan lebih tinggi dari perkotaan hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpotensi secara ekonomis untuk melakukan pekerjaan lebih banyak berada di pedesaan.

Sasaran 9

"Meningkatnya Nilai Tukar Petani"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 25

Capaian Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Tukar Petani	105,71	116	107,70	92,85
2	Produktifitas padi	5,18	48,58	4,52	9,30
3	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	16,62	22,51	21,06	93,56
	Rata – rata capaian				**65,23**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas sasaran ini melalui 3 indikator kinerja maka dapat disimpulkan rata-rata capain kinerja sebesar 65,23 % dengan kategori capaian **Cukup Baik,** berikut uraian masing-masing indikator :

1. **Meningkatnya nilai tukar petani**

Kategori pertanian merupakan tumpuan lapangan pekerjaan utama penduduk Sulawesi Barat, Nilai Tukar Petani gabungan per desember 2016 di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 107,70 % dari target yang ditentukan sebesar 116 % maka capaian kinerja indikator ini adalah 92,85 % dari target yang ditentukan. Kinerja Indikator ini mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Dibandingkan dengan capaian NTP 2015 105,71 maka ada peningkatan sebesar 2.01%. Secara umum indikator NTP Sulawesi Barat selalu menunjukkan peningkatan, hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan petani yang memang sudah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena mengingat penduduk Sulawesi Barat yang memang lebih dominan bekerja pada kategori pertanian. Dengan nilai NTP yang selalu berada di atas 100, ini berarti masyarakat petani di Sulawesi Barat memiliki daya beli yang cukup tinggi atau lebih baik. Berikut tabel NTP 2012-2016 per sub sektor :

Tabel 26

Nilai Tukar Petani 2012 - 2016

Tahun	NTP
2012	104,41
2013	104,26
2014	102,96
2015	104,36
2016	107,70

Sumber : Biro Ekonomi Pembangunan 2017

2. Produktifitas Padi

Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk indonesia , kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi perkapita akibat peningkatan pendapatan.

Produktifitas padi di sulawesi Barat tahun 2016 mencapai 4,52, tapi karena tingginya target RPJMD 22,51, maka capaian kinerja indikator ini hanya 9,30 %.

3. Persentase ketersediaan pangan utama

Ketahanan pangan adalah Ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya, merupakan ukuran/indikator kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu komponen utama ketahanan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar.

Pada tahun 2016 persentase ketersediaan pangan di sulawes barat mencapai 21,06 %. Ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian 2015 yang mencapai 16,62%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja sasaran ini adalah melalui pelaksanaan program :

1. Peningkatan kesejahteraan petani;
2. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan;
3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan;
4. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
5. Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian.

Sasaran 10

“Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan”

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 27

Capaian Kinerja Sasaran 10

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya nilai tukar Nelayan	105,71	100	100,55	100,55
2	Produksi Perikanan Tangkap	55.759.30	50,525	57,325	113,45
3	Produksi Perikanan Budidaya	89.729.96	83,518	102,518	122,74
	Rata – rata capaian				**112,24**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan 3 indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 112,24% dan tergolong **Memuaskan** Berikut uraian masing-masing indikator :

1. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan

Nilai tukar nelayan sub sektor perikanan atau NTN di peroleh dari perbandingan indeks harga yang di terimah petani, NTN merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani, juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian/perikanan dengan barang dan jasa yang di konsumsi maupun untuk biaya produksi, semakin tinggi NTN secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan.

NTN di Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 100,55, kinerja indikator ini didapatkan melalui pelaksanaan program :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
2. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut;
3. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap tahun 2016 mencapai 52,325 Ton jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2015 50,525 ton, maka terlihat ada peningkatan sebesar 1.800 Ton. Capaian kinerja indikator ini didapatkan melalui pelaksanaan program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Kegiatan :

1. Pengembangan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) palipi;
2. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
3. Worshop peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan armada dan alat tangkap.

3. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya tahun 2016 mencapai 102,518 Ton jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2015 83,518 ton, maka terlihat ada peningkatan sebesar 19.000 Ton. Capaian kinerja indikator ini didapatkan melalui pelaksanaan program Pengembangan budidaya perikanan dengan Kegiatan :

1. Pengembangan perikanan budidaya;
2. Pengembangan sarana & prasarana balai benih ikan pantai (BBIP) poniang dan dukungan manajemen teknis lainnya;
3. Sosialisasi dan demo vaksin;

4. Temu lapang budidaya air payau;

5. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya.

Sasaran 11 :

"Mewujudkan Pengarustamaan Gender, Perlindungan Anak dan Perempuan serta Penanganan PMKS"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 28

Capaian Kinerja Sasaran 11

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah PMKS yang tertangani	5.251	36,654	27,059	134,45
	Rata – rata capaian				**134,45**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan 1 indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 134,45 % dan tergolong **Memuaskan.**

Jumlah PMKS yang tertangani melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2016 sebanyak 27,059 jiwa yang terdiri dari 11 jenis PMKS di antaranya keluarga miskin, penyandang cacat, anak terlantar dan wanita tuna susila. Dari target yang ditentukan sebanyak 36,654 jiwa maka Capaian kinerja ini 135,45 %.

Penanganan terhadap keluarga miskin pada tahun 2016 ditargetkan menangani keluarga miskin sebanyak 100.000 KK atau 13,44 % dari populasi keluarga miskin sebanyak 185.942 KK, realisasi penanganan sebanyak 100.673 KK. (101 %) dengan Kategori "***sangat baik***". Adapun bentuk penanganan Fakir Miskin melalui Program Kube FM , PKH, Raskin, RTLH baik bersumber dari APBD maupun APBN. Adapun rinciannya sebagai berikut : Kube Fakir Miskin Pedesaan = 50 Kube x 10 KK = 500 KK, Kube Perkotaan 60 Kube x 10 KK =600 KK, Program Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni sebanyak 131 KK, Program Renstra (Raskin) selama T.A 2016 disalurkan kepada 75.453 KK serta bantuan Program Keluarga Harapan selama T.A 2016 kepada 23.989 KK

Penanganan Penyandang Cacat/Disabilitas Pada tahun 2016 ditargetkan menangani 100 jiwa dan Anak dengan kedisabilitasan (ADK) 150 jiwa atau 9,37 % dari populasi 2.667 jiwa, realisasi penanganan 50 jiwa (50 %) Kategori "***kurang*** " melalaui program pelatihan keterampilan menjahit, alat bantu penyandang disabilitas dan Sarana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas dengan sumber dana APBD dan APBN.

Penanganan Anak terlantar, Jalanan, Berhadapan Hukum, Korban Tindak kekerasan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus pada tahun 2016 ditargetkan 500 jiwa anak dari populasi 24.540 jiwa anak. Melalui program kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) realisasi sebanyak 882 jiwa anak atau 133 % dari yang ditargetkan sehingga pencapaian dapat dikategorikan " **sangat Baik** ".

Penanganan Tuna sosial (PSK/Waria) pada tahun 2016 telah ditargetkan 30 jiwa realisasi 20 orang dengan pencapaian 75 % dengan kategori "**cukup** ". Penanganan lanjut Usia Terlantar pada tahun 2016 ditargetkan 100 jiwa dari populasi 7.986 jiwa dan realisasi penanganannya sebanyak 110 jiwa melalui program Asistensi Lanjut usia Terlantar (ASLUT), UEP Lansia, home care (Pelayanan Asuhan Keluarga) dan beberapa program lansia terlantar lainnya. Dengan demikian pencapaiannya 110 % dengan kategori " **Sangat Baik "**

Penanganan korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah di targetkan 70 jiwa dari populasi 2.020 Jiwa dan realisasi penanganan 70 jiwa melalui program UEP bagi KTK dan PMB dengan kategori " **Sangat Baik** ". Penanganan Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLK) ditargetkan 100 orang dari populasi 18.903 jiwa dan realisasi penanganan sebanyak 100 orang dengan kategori " **Sangat Baik** ". Penanganan Komunitas Adat terpencil (KAT) Pada tahun 2016 ditargetkan menangani 50 KK atau 0,4 % dari populasi 12.628 KK, realisasi penanganan 73 KK (140 %) Kategori "***Sangat Baik*** " melalui program Bantuan Bahan Rumah, Jaminan Hidup 1 (satu) tahun pertama , Alat-alat Rumah Tangga, Alat Pertanian dan Bibit Pertanian

Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Orang Terlantar Pada tahun 2016 ditargetkan penanganannya masing-masing untuk Bencana alam sebanyak 9000 KK dari Populasi warga Daerah Rawan Bencana 29.000 KK , realisasi penanganan Bencana Alam 1186 KK (113 %) Kategori "***Sangat Baik*** " adapun Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah

bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana.

Sasaran 12

"Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 29

Capaian Kinerja Sasaran 12

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	APK PAUD (%)	63,91	64,82	63,74	98,33
	Rata – rata capaian				**98,33**

APK Paud pada tahun 2016 mencapai 63,74, jika dibandingkan dengan kinerja APK paud tahun 2015 yang mencapai 63,91, maka terlihat ada penurunan 0,17%. namun Capaian kinerja terhadap akhir masa periode RPJMD adalah 64,82 dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 96,85.

Kinerja Sasaran ini di capai dari pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan akses layanan PAUD pada tahun anggaran 2016 difokuskan pada pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran PAUD, peningkatan kreatifitas tenaga pendidik dan peningkatan manajemen pengelolaan PAUD oleh masing-masing pengelola.

Target kinerja yang belum terealisasi dengan maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya ini disebabkan karena beberapa kendala dan hambatan yang di hadapi, di antaranya:

a. Terbatasnya Kewenangan Provinsi dalam upaya peningkatan Akses Layanan PAUD;
b. Masih kurangnya lembaga layanan PAUD khususnya di daerah pedesaan;
c. Kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik PAUD yang masih rendah;
d. Kondisi sarana dan prasarana satuan PAUD masih memprihatinkan;
e. Masih adanya kelompok masyarakat yang enggan mengikutkan anaknya yang berumur 2 – 6 tahun di PAUD.

Melihat beberapa kendala dan hambatan yang di hadapi tersebut di atas beberapa langka antisipasi yang akan dilakukan agar angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat meningkat di masa yang akan datang adalah:

1) Menjalin Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Provinsi dan Kabupaten dalam upaya Meningkatkan Mutu dan Akses layanan PAUD;
2) Pemenuhan satu desa satu PAUD, dengan memberikan bantuan pembangunan gedung;
3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan-pelatihan;
4) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PAUD melalui

pemberian bantuan;

5) Pengadaan sarana dan prasarana PAUD;

6) Meningkatkan peran Bunda PAUD di desa untuk mensosialisasikan arti pentingnya pendidikan anak usia dini.

Sasaran 13

"Meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 30

Capaian Kinerja Sasaran 13

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	APK SD/MI/Paket A (%)		97,65	106,05	108,60
2	APK SMP/MTs/Paket B (%)		83,17	77,06	92,65
	Rata – rata capaian				**100,62**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan 2 indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 100,62% dan tergolong **"Memuaskan".** Berikut uraian masing-masing indikator :

1. APK SD/MI/Paket A (%)

Kinerja indikator ini di capai dari pelaksanaan Program wajib belajar pendidikan

dasar Sembilan tahun di dukung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sepanjang tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan Namun dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan tersebut masih di temui beberapa hambatan dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan dasar, yaitu: (1) faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya beberapa anak yang berusia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang masih tidak mau masuk sekolah dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua terutama di daerah terpencil, (2) faktor geografis, dan (3) ketersediaan sarana dan prasarana lembaga penyelenggara pendidikan dasar belum sesuai dengan SPM.

Melihat hambatan dan kendala yang di hadapi dalam upaya meningkatkan APM SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs./Paket B, beberapa langkah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Penyediaan sarana dan prasarana;
b. Peningkatan daya tampung pada daerah-daerah tertentu melalui pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru;
c. Pengembalian anak putus sekolah untuk bersekolah;
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

2. APK SMP/MTs/Paket B (B)

Kinerja indikator ini di capai dari pelaksanaan Program Pendidikan Menengah di dukung dengan beberapa langkah kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain;

a. Penyediaan sarana dan prasarana;
b. Peningkatan daya tampung pada daerah-daerah tertentu melalui pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru;
c. Meningkatkan peran partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan pendidikan menengah.

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja utama " APK SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C" pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan realisasi capaian 77,06% atau selisih 3,05%.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan menengah adalah: (1) faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti masih kurangnya partisipasi masyarakat, (2) faktor geografis pada wilayah-wilayah tertentu yang menuntut masyarakat menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk sampai ke sekolah dan (3) ketersediaan sarana dan prasarana lembaga penyelenggara pendidikan menengah yang

belum memadai dan (4) Kurangnya data pemetaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan antar kabupaten se-Provinsi SulawesiBarat.

Melihat beberapa kendala dan hambatan yang di hadapi tersebut di atas maka koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Barat tentang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan untuk lebih ditingkatkan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan pendidikan tentang data Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di satuan pendidikan, melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan satuan pendidikan dan komite sekolah tentang perlunya partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan APK jenjang sekolah menengah, serta koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka percepatan peningkatan APK jenjang pendidikan menengah.

Sasaran 14

"Terwujudnya pemberantasan buta aksara"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 31

Capaian Kinerja Sasaran 14

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka melek huruf	95,27	90,00	83,21	84,90
	Rata – rata capaian				**84,90**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan indikator kinerja, angka melek huruf maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 84,90% dan tergolong **"Sangat Baik".**

Kinerja Sasaran ini di capai dari pelaksanaan program pendidikan non formal, dari tabel pengukuran kinerja di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena realisasi capaian hanya 83,21% dari target yang 100% yang direncanakan. Adapun capaian kinerja sasaran ini selama masa RPJMD 2012-2016 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 32 capaian indikator Angka Melek Huruf

Tahun	Angka Melek Huruf
2012	88,79
2013	90,54
2014	95,27
2015	95,27
2016	83,21

Tidak terpenuhinya target indikator kinerja utama program pendidikan non formal antara lain disebabkan karena adanya kecenderungan masyarakat yang kurang peduli akan pentingnya pendidikan sehingga berpengaruh secara siginifikan terhadap peningkatan angka melek huruf. Melihat hambatan dan kendala yang di hadapi dalam upaya meningkatkan

angka melek huruf, beberapa langkah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk memberantas buta aksara;

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Provinsi dan Kabupaten dalam upaya pelaksanaan pembelajaran buta aksara;

c. Program pendidikan non formal akan lebih difokuskan pada kegiatan yang di anggap akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan angka melek huruf/penuntasan buta aksara;

d. Perbaikan strategi pembelajaran kegiatan penuntasan buta aksara.

Sasaran 15

“ Meningkatnya Minat Baca Masyarakat “

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 33

Capaian Kinerja Sasaran 15

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Minat Baca	-	0,2	0,028	0,14
	Rata – rata capaian				**0,14**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan indikator Indeks minat baca, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 100,62% dan tergolong **"Kurang".**

Indeks Minat baca di Sulawesi Barat pada tahun 2016 hanya mencapai 0,028, indikator ini baru digunakan pada tahun 2016 sebagai indikator sasaran meningkatnya minat baca masyarakat. Tahun sebelumnya indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah jumlah kunjungan ke perpustakaan dan jumlah koleksi buku perpustakaan.

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2016 sebanyak 2.291 kunjungan yang di peroleh melalui, perpustakaan umum daerah 425 kunjungan dan melalui perpustakaan keliling 1.866 kunjungan, salah satu faktor yang bisa meningkatkan minat baca masyarakat adalah ketersediaan bahan bacaan. Pada tahun 2016 target peningkatan jumlah koleksi perpustakaan sebanyak 4.500 Eksamplar dengan realisasi sebanyak 1.600 Eksamplar.

Kinerja sasaran ini dihasilkan dari Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah dengan melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca;
2. Pengembangan minat dan budaya baca.

Kendala yang di hadapi sehingga pencapaian target indikator ini belum maksimal adalah letak perpustakaan yang sangat jauh dari jangkauan

masyarakat dan perpustakaan yang ada saat ini belum memenuhi standar perpustakaan sehingga diperlukan perpustakaan yang layak yang sesuai standar.

Sasaran 16

"Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda, Olah Raga dan Seni"

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 34

Capaian Kinerja Sasaran 16

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	8	80
2	Jumlah kader kewirausahaan muda	40	40	75	187,5
3	Prestasi Atlit (Medali Emas)	3 Emas	3 Emas	3 Emas	100
	Rata – rata capaian				**122,5**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan 3 indikator kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 122,5% dan tergolong **"Memuaskan".** Berikut uraian masing-masing indikator :

1. **Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

Jumlah kegiatan kepemudaan berkaitan dengan akumulasi keseluruhan aktifitas pemuda yang dilaksanakan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang mana kegiatan yang dilakukan menjadi tolak ukur kinerja untuk meningkatkan potensi pemuda. sebanyak 8 kegiatan dari target yang telah ditentukan sebanyak 10 kegiatan sehingga capaian indikator ini adalah 80 %.

Kegiatan kepemudaan menjadi salah satu indikator kinerja bagi Dinas Pemuda, olah raga dan pariwisata mengingat bahwa pemuda sebagai elemen penting masyarakat dalam pembangunan daerah, sudah sepatutnya memaknai dan mewarnai setiap kebijakan pembangunan daerah. Di sinilah pentingnya pemuda memposisikan diri dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan daerah saat ini.

Dari pendataan kegiatan kepemudaan sejak tahun 2012 hingga 2014 dapat digambarkan bahwa terjadi peningkatan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dari tahun ke tahun. Tahun 2012, total kegiatan kepemudaan berjumlah 5 kegiatan dan di tahun berikutnya berjumlah 6 kegiatan. Di tahun 2014, kegiatan kepemudaan meningkat menjadi 7 kegiatan. Sedangkan di tahun 2015, realisasi kegiatan kepemudaan memenuhi target kinerja yakni 10 kegiatan.

Berdasarkan RPJMD tahun 2012-2016 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, target jumlah kegiatan kepemudaan di tahun 2015 adalah 21 kegiatan.

Target ini sesuai dengan target kinerja yang ada di perjanjian kinerja. Tidak seperti halnya di tahun 2015 di mana nilai target kinerja pada perjanjian kinerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan nilai target kinerja yang ada di RPJMD.

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan minimal bidang Pendidikan dijelaskan bahwa dalam setahun minimal terdapat 5 (Lima) program kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Selain itu di atur pula bahwa partisipasi pemuda meningkat 5 % setiap tahunnya. Standar nasional ini menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan. Melirik target di tahun 2016 ini, dapat dinyatakan bahwa realisasi kegiatan di bidang kepemudaan telah melebihi target nasional.

Sebagai bahan evaluasi selama lima tahun ini, dari tahun 2012 hingga 2016, total seluruh kegiatan kepemudaan mencapai 36 kegiatan. Sehingga dapat di hitung total pemuda yang telah mendapatkan intervensi kegiatan kepemudaan adalah sekitar 1.800 orang. Dengan domain, pemuda kader 785 orang. Pemuda pelopor 106 orang dan selebihnya adalah pemuda yang menjadi kader kewirausahaan, kepanduan, peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memenuhi target Indikator ini tidak terlepas dari geliat gerak pemuda Sulawesi Barat yang

menginspirasi SKPD untuk mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, bantuan dari berbagai stakeholder turut serta memotifasi upaya Pemerintah dalam meningkatkan kinerja mencapai target yang telah ditentukan

2. Jumlah Kader Kewirausahaan Muda

Pada tahun 2016 Jumlah kader kewirausahaan muda ditargetkan 40 orang dan realisasi sebanyak 75 orang kelompok sehingga capaian indikator ini adalah 187,5 %. Akumulasi nilai ini adalah perpaduan antara kader yang kewirausahaan dan kader yang mengikuti pelatihan keterampilan.

Mengingat data pengangguran pemuda masih cukup tinggi, apabila tidak memperoleh perhatian yang serius akan mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula. Beberapa masalah sosial yang diakibatkan oleh tingginya pengangguran di antaranya penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, pergaulan bebas, premanisme, trafficking, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan mengganggu pembangunan di segala bidang dan stabilitas nasional. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah melaksanakan dengan dua jalur solusi, yaitu Pendidikan Formal yang salah satunya diberikan pelayanan oleh Poli Media. Kedua, Program Kewirausahaan Pemuda dengan cara untuk memberikan kesempatan belajar (langsung) bagi pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang di topang oleh sikap mental kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta berani menanggung resiko dalam mengelola

potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Berbeda dengan tahun 2015, di mana satuan untuk indikator kinerja ini adalah kelompok. Namun berdasarkan perjanjian kinerja DISPOP 2016 maka kader kewirausahaan tahun 2016 adalah jumlah kader yang mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diakumulasikan dalam satuan “orang”

Kader kewirausahaan 2016 memiliki segmentasi yang berbeda dengan kader kewirausahaan tahun 2015. Jika sebelumnnya segmen kewirausahaan muda adalah kelompok yang memperoleh bantuan kewirausahaan maka di tahun 2016 ini adalah jumlah peserta program peningkatan kecakapan hidup pemuda yang tak lain adalah kewirausahaan. Sama halnya dengan tahun 2015, pada tahun 2014 capaian kader kewiarausahaan pemuda adalah 5 kelompok dan realisasi ini sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas, Indikator Jumlah Kader Kewirausahaan Muda tidak terjabarkan. Namun, pada bagian Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda diuraikan target-target yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam jangka 5 (Lima) tahun

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas dalam pencapaian Indikator yang melebihi target adalah adanya support dari dana Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI serta upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadikan program

kewirausahaan sebagai program unggulan dalam meningkatkan kemandirian pemuda sebagai upaya mengurangi pengangguran di kalangan pemuda sebab pengangguran adalah salah satu biang terjadinya kemiskinan.

3. Prestasi Atlit (Perolehan Medali Emas)

Indikator Prestasi atlit dikaitkan dengan medali yang di raih oleh atlit Sulawesi Barat dalam kejuaraan nasional. Tahun 2016 target kegiatan olah raga adalah 48 kegiatan namun realisasi hanya mencapai 5 kegiatan. Meskipun demikian target kinerja indikator ini dapat di raih. Adapun prestasi keolahragaan yang di raih selama tahun 2016 adalah :

1. Juara 3 CATUR-PON JABAR;
2. Juara 3 Silat Putri (Kelas Berat) Kejurnas PPLP Silat di Manado (10- 15 Oktober 2016);
3. 3 Emas (Canoe Putri Jarak 500 m; Canoe Putri Jarak 200 m; Kayak 1 Putri 500 m) - Kejurnas PPLP dayung di Riau (31 Oktober- 5 November 2016);
4. Juara 3 Puteri - Kejurnas PPLP Takraw di Semarang (5 - 11 November 2016).

Selama 5 tahun jumlah total keseluruhan kegiatan keolahragaan adalah 35. Dengan alokasi setiap tahun adalah 6 kegiatan (2012), 8 kegiatan (2013), 10 kegiatan (2014), 6 kegiatan (2015), 5 kegiatan (2016).

Geliat keolahragaan yang mewarnai langkah pembangunan di negeri Malaqbiq ini merupakan perpaduan harmonis antara DISPOP selaku leading

sektor birokrasi bersama stakeholder dan seluruh insan keolahragaan yang senantiasa bersatu untuk mewujudkan sektor olahraga sebagai salah satu aspek yang mampu mengangkat harkat dan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional bahkan internasional.

Berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini di antaranya adalah dengan membentuk klub binaan cabang olahraga, di tahun 2016 ada 5 (lima) klub binaan yang terdiri dari cabang olah raga bulu tangkis, sepak bola, pencak silat, sepak takraw dan atletik. Klub binaan ini tidak hanya membina usia dewasa tapi juga usia sekolah. Diharapakan dengan adanya pembinaan ini akan muncul bibit - bibit baru dalam bidang olahraga.

Kebijakan lain yang dijalankan adalah dengan menambah dan merevitalisasi sarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat dari kurun waktu 2012 – 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah merevitalisasi kurang lebih 14 lapangan olahraga (Sepak bola, Volly, Futsal, basket, takraw, Bulu tangkis dan tennis) yang berada di kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali. Selain itu juga pelaksanaan beberapa event perlombaan untuk menjaring atlit berbakat daerah.

Sasaran 17

“Berkurangnya Luas Lahan Kritis”

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel Pengukuran berikut ini :

Tabel 35

Capaian Kinerja Sasaran 17

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2015	2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	285	2.549,05	1.659,98	65,12
	Rata – rata capaian				**65,12**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ini dengan indikator kinerja Lahan kritis yang di rehabilitasi, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sebesar 65,12% dan tergolong **"Cukup Baik".**

Luas Lahan Kritis yang telah di rehabilitasi pada tahun 2016 adalah seluas 1.659,98 Ha dari target yang ditentukan adalah 2.549,05 Ha, maka capaian indikator ini adalah 65,12 % dari target yang telah ditentukan. Kurangnya pencapaian target lahan kritis yang di rehabilitasi disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran yang terjadi pada bulan agustus sehingga pelaksanaan kegiatan yang berada di triwulan III dan IV tidak dapat dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi luas lahan kritis sepanjang tahun 2016 adalah dengan pelaksanaan Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan dengan kegiatan Pengelolaan Hutan KPH Budong-budong sehingga penyelenggaraan pengelolaan hutan berdasarkan peruntukan dan fungsinya dapat terlaksana.Tujuan dari kegiatan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) yaitu: (1) Untuk meningkatkan daya dukung DAS dan fungsi hutan

sehingga berfungsi optimal sebagai upaya pengendalian bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, serta mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global, (2) Menunjang pembangunan dan operasionalisasi KPH melalui penyediaan sarana dan prasarana KPH. Sasaran kegiatan Fasilitasi Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) adalah :

1. Lahan kritis di dalam kawasan hutan pada areal kerja KPH Ganda Dewata 215 Ha;
2. Rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan pada areal KPH Budong-budong seluas 150 Ha;
3. Kawasan mangrove pada areal kerja KPH Budong-budong seluas 6 Ha;
4. Bibit penghijauan lingkungan dengan jumlah 30.250 Batang pada areal KPH Ganda Dewata.

Produk yang dihasilkan dari kegiatan Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah :

1. Tanaman pada lahan kritis di dalam kawasan hutan pada areal kerja KPH Ganda Dewata seluas 215 Ha;
2. Tanaman pada lahan kritis di dalam kawasan hutan pada areal kerja KPH Budong-budong seluas 150 Ha.

Manfaat dari produk yang dihasilkan pada kegiatan Fasilitasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah :

1. Terehabilitasinya lahan kritis di dalam kawasan hutan pada areal kerja KPH Ganda Dewata dan pada areal kerja KPH Budong-budong;

2. Terlaksananya penghijauan lingkungan dan terpenuhinya sarana dan prasarana operasional KPH.

Kawasan hutan yang terdapat di wilayah Sulawesi Barat dengan kondisi kritis (lahan kritis) seluas ± 283.395,13 Ha di mana terdapat 178.462,83 ha di dalam kawasan hutan dan 104.932,30 ha di luar kawasan hutan. Lahan kritis ini tersebar di daerah kab/kota meliputi; Kabupaten Mamuju seluas ± 81.028,13 ha dimana 71.533,83 ha di dalam kawasan hutan dan 9.494, 30 di luar kawasan hutan, Majene seluas ± 39.080 ha di mana terdapat 19.814 ha di dalam kawasan hutan dan 19.266 ha di luar kawasan hutan, Mamasa seluas ± 104.382 ha di mana terdapat 40.349 ha di dalam kawasan hutan dan 64.033 ha di luar kawasan hutan, Kabupaten Polewali Mandar seluas ± 33.109 ha di mana terdapat 21.970 ha di dalam kawasan hutan dan 11.139 ha di luar kawasan hutan dan Mamuju Utara seluas 92.055,19 ha di mana terdapat 57.537 Ha di dalam kawasan hutan dan 34.518,19 Ha di luar kawasan hutan.

Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan dari kawasan hutan meliputi; Kayu Eboni, Meranti, Getah Pinus, Jati, Palapi, Durian, Damar, Rotan, Kemiri dan Kayu campuran lainnya dengan produksi kayu bulat ± 756,71 $M^{3,}$ Kayu Olahan 1.645,5446 M^3 dan produksi hasil hutan non kayu seperti rotan ± 936,321 ton dan Getah Pinus 176.509 Kg. Potensi Hutan di Sulawesi Barat seluas ± 1.107.058 Ha yang terdiri atas Kawasan Hutan Lindung Seluas 452.387 Ha, Hutan produksi terbatas (HPT) 336.061 Ha, Hutan Produksi 77.345 Ha, Hutan

Swaka margasatwa (HSAW) 214.184 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat di konversi 27.081 Ha dengan potensi hasil hutan umumnya meliputi; Kayu Eboni, Maranti, Getah Pinus, Jati, Palapi, Durian, Damar, Rotan, Kemiri dan Kayu campuran lainya hasil produksi dari sektor kehutanan selama ini telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai kinerja target indikator sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, selain faktor pendukung lain maka aspek keuangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan dalam pencapaian kinerja indikator adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Laporan Surplus Defisit dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Adapun realiasi anggaran per Sasaran Kinerja tahun anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 36

Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran

No	Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien berdasarkan prinsip good governance	- Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6.054.909.055	5.208.945.347	86,02
		- Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.259.609.613	2.855.993.613	87,61
		- Penataan regulasi keuangan dan aset barang milik daerah	557.132.000	554.850.475	99,59
		- Peningkatan kapasitas pengelolaan barang milik daerah	1.924.340.975	1.638.775.345	85,16
		- Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah	342.371.800	342.371.300	99,99
2	Treselenggaranya percepatan pembangunan	- Pembangunan jalan dan jembatan	63.982.261.250	49.808.295.800	77,84
		- Rehabilitasi/	19.719.035.000	19.680.297.655	99,80

No	Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
	infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran transportasi ke pusat-pusat produksi	Pemeliharaan jalan dan jembatan			
3	Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur energi listrik	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	584.145.000	583.975.000	99,97
4	Terselenggaranya perhubungan darat, laut dan udara	- Pembangunan sarana dan Prasarana perhubungan - Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan - Peningkatan pelayanann angkutan	108.000.000 770.000.000 270.525.000	108.000.000 770.000.000 270.525.000	100 100 100
5	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional	- Pengembangan pemasaran pariwisata - Pengembangan	3.986.045.000 1.920.130.000	3.958.189.000 1.842.430.000	99,30 95,95

No	Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
		destinasi pariwisata			
6	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	- Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	504.730.000	301.290.000	59,69
		- Perbaikan gizi masyarakat	599.525.000	474.689.000	79,18
		- Obat dan perbekalan kesehatan	7.791.515.000	5.482.926.318	70,37
		- Upaya kesehatan masyarakat	44.600.000	40.020.000	89,73
		- Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	96.960.001	96.960.001	100
		- Pengembangan lingkungan sehat	317.817.300	299.552.300	94,25
		- Pencegahan penanggulangan penyakit	130.250.000	111.990.000	85,98
		- Kebijakan dan managemen pembangunan kesehatan	229.173.900	161.281.900	70,38
		- Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya	60.705.000	48.705.000	80,23

No	Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
		manusia kesehatan - Standarisasi pelayanan kesehatan	1.265.539.400	1.232.243.700	97,37
7	Menurunnya persentase penduduk miskin	- Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil & PMKS	962.444.995	946.552.852	98,34
		- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	6.086.931.900	6.071.814.800	99,75
8	Menurunnya persentase pengangguran	- Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	4.806.535.274	4.776.540.000	99,38
		- Peningkatan kesempatan kerja	200.000.000	199.900.000	99,20
9	Meningkatnya nilai tukar petani	- Perencanaan pembangunan ekonomi	211.293.000	176.143.240	83,36
		- Peningkatan kesejahteraan petani	1.619.477.000	1.401.101.433	86,52
		- Peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian	522.187.425	484.451.425	92,77

No	Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
		- Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	1.835.112.500	1.834.267.500	99,95
		- Peningkatan ketersediaan pangan	417.590.000	417.490.000	99,98
		- Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan	1.275.714.000	1.271.682.000	99,68
		- Peningkatan pengamanan daerah rawan pangan	486.510.600	486.050.000 .	99,90
		- Peningkatan keamanan pangan	660.274.900	657.897.000	99,63
		- Peningkatan dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan	348.925.000	346.061.000	99,17
10	- Meningkatnya nilai tukar nelayan - Produksi Perikanan (Ton)	- Optimalisasi Pengelolaan pemasaran produksi perikanan	286.500.600	286.500.600	100
		- Pengembangan perikanan tangkap	5.689.204.400	5.214.146.325	91,64
		- Pengembangan budidaya perikanan	5.434.351.150	5.150.885.400	94,78

No	Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
11	Mewujudkan pengarustamaan gender, perlindungan anak dan perempuan, serta penanganan PMKS	- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial - Pembinaan panti asuhan dan jompo - Pengembangan pembangunan kesejahteraan sosial	93.800.000 286.540.000 418.664.100	91.915.000 285.142.250 392.251.000	97,99 99,51 93,69
12	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan anak usia dini	- Pendidikan anak usia dini	795.715.000	785.935.000	98,77
13	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun	- Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Pendidikan Menengah	5.031.584.700 79.711.136.260	5.013.773.180 77.490.912.934	99,64 97,21
14	Terwujudnya pemberatntasan buta aksara	- Pendidikan non Formal	2.654.974.764	2.580.624.685	97,19
15	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pengembangan budaya baca dan pembinaan	309.053.200	309.053.200	100

No	Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan
		perpustakaan			
16	Meningkatnya peran dan prestasi pemuda, olah raga dan seni	- Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	530.000.000 1.808.300.000	503.437.000 1.690.316.000	94,98 93,47
17	Berkurangnya luas lahan kritis	Perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	5.079.747.000	4.780.487.450	94,12
JUMLAH			***242.081.888.062***	***219.517.638.028***	***90,68%***

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 merupakan laporan kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012 - 2016, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang menyajikan keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun (2016) di lihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis yang telah ditetapkan serta melalui alur proses SAKIP yang baik.

Dalam RPJMD telah ditetapkan 42 sasaran strategis yang harus di capai, kemudian telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja 2016 sebanyak 17 sasaran strategis dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 34, Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 menunjukkan hasil kinerja yang sangat baik yakni dari 30 indikator kinerja utama. 60% yang berkategori Memuaskan, 16,66 % dengan kategori kurang dan lainnya terbagi pada kategori sangat baik dan cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh elemen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah bekerja keras untuk mencapai visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan keberhasilan namun ada beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kinerja di masa mendatang, antara lain :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan untuk melaksanakan sistem AKIP, menyempurnakan semua produk dokumen - dokumen perencanaan kinerja yang ada dan menjaga keselarasan antar dokumen yang di maksud, serta dalam pembuatan dokumen perencanaan seharusnya menyajikan indikator kinerja yang SMART;
2. Diperlukan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam segala bidang di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran demi menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Menyusun dan menetapkan regulasi mekanisme penerapan manajemen kinerja yang berlaku secara spesifik.
6. Memperkuat fungsi koordinasi antar seluruh SKPD yang ada serta instansi terkait baik di pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga di dukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun sebesar anggaran 2016 Rp 242.081.888.062,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 219.517.638.028,- atau 90,68 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 ini. Semoga dipergunakan oleh seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. sehingga LKjIP ini benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan yang semakin baik.